

PENGARUH PROGRAM
KEMITRAAN BAGI PENGEMBANGAN
EKONOMI LOKAL (KPEL) TERHADAP
PENDAPATAN PETANI BUDIDAYA
ULAT SUTERA DI KABUPATEN WONOSOBO



TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S2

Program Studi
Magisten Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Elis Suyono
C4B 000107

PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
FEBRUARI
2006

TESIS
PENGARUH PROGRAM
KEMITRAAN BAGI PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL
(KPEL) TERHADAP PENDAPATAN PETANI BUDIDAYA
ULAT SUTERA DI KABUPATEN WONOSOBO

Disusun oleh :
Elis Suyono
C4B000107

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji
Pada Tanggal 24 Februari 2006
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama

Anggota Penguji

Dr. FX Sudyanto MS

Dr. Dwisetia Poerwono, MSc

DRS. Nugroho SBM, MT

Drs. Bagio Mudzakir MT

Dr. Purbayu Budi Santoso MS

Telah dinyatakan lulus Program Studi
Magisten Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Tanggal

Dr. Dwisetia Poerwono MSC
NIP. 130 812 321

PERNYATAAN

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini saya :

N a m a : Elis Suyono
Nim : C4B000107
Program Studi : Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (MIESP)
Alamat : Jl. Raya Kelibeber KM 2 Ketinggring 1/7 Kelurahan
Kalianget Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam daftar pustaka

Semarang 24 Februari 2006
Saya Yang Menyatakan

Elis Suyono

ABSTRACT

Indonesia has big enough potency to yield natural silkworm fiber. Condition of environment and nature in Indonesia are also good enough to develop silkworm. This matter enables mulberry crop as silkworm food to grow and expand and it can also be cultivated a whole year, proven since year 1718 M (precisely, during the Dutch colonial, by Zwaardcroon) some of Indonesian people have recognized silkworm cultivation.

In Wonosobo Regency, silkworm cultivation which has been developed since 1998, quantitatively, from year to year the amount growth of farmers is always increased. Because of environmental weather and the potency are supported, hence this silkworm cultivation becomes developed commodity cluster through Program of Partner fo Local Economic Expansion ('Program Kemitraan bagi Pengembangan Ekonomi Lokal – KPEL')

KPEL is a program from central government which is implemented in Wonosobo Regency. This program is expected to become stimulant and motivator to local government in growing local economy. Similar programs like: IDT, KUT, PDMDKE, PPK, PMDP, MOP, SLT and others have been executed by government in order to raise of poorness. Some of those programs were successful, and some others were failed, then how about KPEL? Will it be successful or not. This case becomes the focus of this research.

The aim of this research wants to know how far the influence of KPEL program to the income of silkworm cultivation farmer in Wonosobo Regency by comparing before and after following KPEL program. Sample in this research is 30 from 97 silkworm cultivation farmers which have produced cocoons. Data are collected through field study and analyzed with two approaches namely: Descriptive Analyze and Test Rank Sign Wilcoxon Analyze

After data are processed, from 6 researched variables: width of farm (significance value, 000), amount of production (assess significance,000), amount of labor (significance value 000), average of earning (significance value , 000), average of saving (significance value , 0,43) and independence level (significance value, 000) and its probability value is 0,05. These matters indicate that Program of Partner to Local Economic Expansion (KPEL) statistically has a positive effect to earnings of silkworm cultivation farmer in Wonosobo Regency.

The result of those research gives implication that one of government efforts in growing local economy which is purposed to raise the local people poorness, can be conducted with Program of Partner to Local Economic Expansion (KPEL). Besides, this program can improve the skill of silkworm cultivation farmers (as program receivers), it can also improve the earnings of silkworm cultivation farmers in Wonosobo Regency.

ABSTRAKSI

Indonesia memiliki potensi cukup besar untuk menghasilkan serat sutera alam. Kondisi alam dan lingkungan di Indonesia juga cukup menguntungkan bagi pengembangan budidaya ulat sutera. Hal inilah yang memungkinkan tanaman murbei sebagai pakan ulat sutera untuk tumbuh dan berkembang serta dibudidayakan sepanjang tahun, terbukti sejak tahun 1718 M. (tepatnya pada zaman kolonial belanda, oleh Zwaarddecroon) sebagian masyarakat Indonesia telah mengenal budidaya ulat sutera.

Di Kabupaten Wonosobo budidaya ulat sutera telah dikembangkan sejak tahun 1998, secara kuantitatif perkembangan jumlah petani dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Karena potensi dan cuaca serta lingkungan yang sangat mendukung, maka budidaya ulat sutera ini menjadi klaster komoditas yang dikembangkan melalui Program kemitraan Bagi Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL).

KPEL adalah merupakan program dari pemerintah pusat yang diimplementasikan di daerah Kabupaten Wonosobo. Program ini diharapkan mampu menjadi motivator dan stimulan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan ekonomi lokal. Program serupa seperti : IDT, KUT, PDMDKE, PPK, PMDP, PEL, SLT dan lain sebagainya pernah dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan. Program-program tersebut tentunya ada yang berhasil, ada yang kurang berhasil bahkan ada yang tidak berhasil, lalu bagaimana dengan KPEL ?. berhasil atau tidak. Inilah yang menjadi fokus penelitian kali ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh program KPEL terhadap pendapatan petani budidaya ulat sutera di Kabupaten Wonosobo dengan cara membandingkan sebelum dan sudah mengikuti program KPEL. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 dari 97 petani budidaya ulat sutera yang sudah memproduksi kokon. Data dikumpulkan melalui studi lapangan dan dianalisa dengan dua pendekatan yakni : analisis diskriptif dan analisis Uji Pangkat Tanda Wilcoxon.

Setelah data diolah, dari 6 variabel yang diteliti yakni : Luas lahan (nilai signifikansi ,000), jumlah produksi (nilai signifikansi ,000), jumlah tenaga kerja (nilai signifikansi ,000), pendapatan rata-rata (nilai signifikansi ,000), tabungan rata-rata (nilai signifikansi 0,43) dan tingkat kemandirian (nilai signifikansi ,000), sedangkan nilai probabilitasnya adalah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Program Kemitraan bagi Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL) secara statistik berpengaruh positif terhadap pendapatan petani budidaya ulat sutera di Kabupaten Wonosobo

Hasil penelitian diatas, memberikan implikasi bahwa salah satu upaya pemerintah dalam mengembangkan ekonomi lokal yang bermuara kepada pemberantasan kemiskinan di daerah, bisa dilakukan dengan program Kemitraan bagi Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL). Program ini selain dapat meningkatkan ketrampilan petani budidaya ulat sutera (sebagai penerima program) juga mampu meningkatkan pendapatan petani budidaya ulat sutera yang ada di Kabupaten Wonosobo

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji sukur kehadirat Allah SWT, atas petunjuk, pertolongan dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : PENGARUH PROGRAM KEMITRAAN BAGI PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (KPEL) TERHADAP PENDAPATAN PETANI BUDIDAYA ULAT SUTERA DI KABUPATEN WONOSOBO

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis mendapatkan masukan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan yang berbahagia ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Dwisetia Poerwana M.Sc, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Diponegoro, Semarang, dan selaku ketua Dewan Penguji
2. Bapak Dr. Purbayu Budisantoso, MS. Selaku Dewan Penguji dan Dosen Program Studi MIESP
3. Bapak Drs. Bagio Mudakir. MT. Selaku Dewan Penguji dan Dosen Program Studi MIESP
4. Bapak Dr. FX Sugianto MS. Selaku dosen pembimbing utama, yang dengan sabar membimbing dan memberi masukan dengan teliti
5. Bapak Drs. Nugroho SBM, MT. Selaku Dosen pembimbing Pendamping dan juga dosen p[rogram studi MIESP
6. Bapak / Ibu dosen dan kawan-kawan mahasiswa program studi MIESP Universitas Diponegoro Semarang
7. Istriku Musdalifah dan ketiga anakku : Maulana Iqbal faris Rizqi, Bariklana Riza bayu Aji, Muhammad Naufal Khaief Abdillah, yang dengan sabar selalu memberi dorongan dalam rangka penyelesaian studi

Penullis menyadari, dengan berbagi keterbatasan baik ilmu pengetahuan, waktu dan lain sebagainya tesis ini masih jauh dari sempurna. Berdasarkan hal

tersebut, mnaka penulis menerima masukan, kritik dan koreksi serta saran untuk penulisan karya ilmiah selanjutnya dimasa yang akan datang

Semoga bermanfaat

Wonosobo, Februari 2006

Elis Suyono

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
ABSTRACT.....	iv
ABSTRAKSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	10
1.3 Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian.....	12
1.3.1 Tujuan Penelitian	12
1.3.2 Manfaat Hasil Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS	
2.1 Tinjauan Pustaka	14
2.1.1 Pembangunan Ekonomi Daerah.....	14
2.1.1.1 Teori Perubahan Sosial.....	18
2.1.1.2 Teori Sumber Daya manusia.....	22
2.1.2 Program Kemitraan Bagi Pengembangan Ekonomi Lokal	24

2.1.2.1 Tujuan Program KPEL.....	28
2.1.2.2 Memulai Kemitraan KPEL..	29
2.1.2.3 Kerangka Kelembagaan Program KPEL..	35
2.1.2.4 Peran Pendampingan Dalam Program KPEL.....	39
2.1.3 Konsep Persuteraan Alam.....	46
2.1.3.1 Sejarah Persuteraan Alam	48
2.1.3.2 Perkembangan Persuteraan Alam di Indonesia	51
2.1.3.3. Budidaya Tanaman Murbei...	55
2.1.3.4 Budidaya Ulat Sutera.....	57
2.2 Penelitian Terdahulu.....	61
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	69
2.4 Hipotesis.....	70

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional Variabel	72
3.2 Jenis dan Sumber Data	73
3.3 Populasi dan Sampel	74
3.4 Metode Pengumpulan Data	76
3.5 Teknik Analisis	76

BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1 Letak Geografi	79
4.2 Luas Wilayah	81
4.3 Keadaan Iklim	81
4.4 Pengembangan Budidaya Ulat Sutera.....	81
4.5 Profil Responden.....	85

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis Deskriptif	95
5.2 Analisis Uji Pangkat Tanda Wilcoxon.....	100

5.2.1. Luas Lahan	101
5.2.2. Jumlah Produksi	102
5.2.3. Jumlah Tenaga Kerja.....	103
5.2.3. Pendapatan Rata-Rata	104
5.2.3. Tabungan Rata-Rata.....	106
5.2.3. Tingkat Kemandirian	107

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan	109
6.2 Saran.....	110

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Perkembangan Produksi Kokon di Indonesia	5
1.2	Proyeksi Permintaan Barang Sutera Dalam Negeri Sampai Dengan Tahun 2007.....	7
2.1	Daftar Penenelitian Terdahulu	68
3.1	Penentuan Jumlah Responden Berdasarkan Masing-Masing Skala Luas Lahan.....	75
4.1	Tabel Jumlah Kecamatan, Luas Wilayah, Jumlah Desa dan Jumlah Kelurahan.....	80
4.2	Perkembangan Jumlah Petani Budidaya Ulat Sutera di Kabupaten Wonosobo.....	84
4.3	Umur Responden Petani Budidaya Ulat Sutera di Kabupaten Wonosobo	86
4.4	Tingkat Pendidikan Responden Petani Budidaya Ulat Sutera di Kabupaten Wonosobo.....	87
4.5	Luas Lahan Responden Sebelum dan Sesudah Mengikuti Program KPEL.....	88
4.6	Jumlah Produksi Kokon Responden Sebelum dan Sesudah Mengikuti Program KPEL.....	89
4.7	Jumlah Tenaga Kerja Responden Sebelum dan Sesudah Mengikuti Program KPEL.....	90
4.8	Pendapatan Rata-rata Responden Sebelum dan Sesudah Mengikuti Program KPEL.....	91
4.9	Jumlah Tabungan Rata-Rata Responden per tahun Sebelum dan Sesudah Mengikuti Program KPEL.....	93
4.10	Tingkat Kemandirian Responden Dalam Mengelola Budidaya Ulat Sutera.....	93
5.1	Hasil Analisis Luas Lahan	101
5.2	Hasil Uji Hipotesis Luas Lahan	101
5.3	Hasil Analisis Jumlah Produksi.....	102
5.4	Hasil Uji Hipotesis Jumlah Produksi.....	102
5.5	Hasil Analisis Jumlah Tenaga Kerja.....	103
5.6	Hasil Uji Hipotesis Jumlah Tenaga Kerja.....	104
5.7	Hasil Analisis Pendapatan Rata-Rata.....	105
5.8	Hasil Uji Hipotesis Pendapatan Rata-Rata.....	105
5.9	Hasil Analisis Tabungan Rata-Rata.....	106
5.10	Hasil Uji Hipotesis Tabungan Rata-Rata.....	106
5.11	Hasil Analisis Tingkat Kemandirian.....	107
5.12	Hasil Uji Chi-Kuadrat.....	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
2.1	Struktur Kelembagaan Dalam Program KPEL.....	35
2.2	Alur Pendampingan Dalam Program KPEL.....	42
2.3	Kerangka Pemikiran Teoritis.....	70

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Form Isian Pengaruh Program KPEL Terhadap Pendapatan petani Budidaya Ulat Sutera di Kabupaten Wonosobo
- Lampiran 2 Tabel Data Variabel – Variabel yang diteliti dan hasil Uji Pangkat tanda Wilcoxon
- Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah yang diberlakukan oleh pemerintah selama kurang lebih 25 tahun, ternyata belum sepenuhnya membawa keberhasilan pembangunan disegala bidang. Hal ini tentunya perlu kita sadari, dengan keterbatasan baik sumber daya manusia maupun sumber dana yang dimiliki pemerintah tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan negara yang terdiri dari berbagai kepulauan ini.

Tentunya kita juga harus menyadari, keberhasilan pembangunan diberbagai bidang yang dicapai pemerintah pada masa Orde Baru. disamping juga harus mengakui beberapa kelemahan dan kekurangan yang terjadi pada masa pemerintahan itu. Sehingga penilaian terhadap pembangunan diberbagai bidang yang telah dilaksanakan pemerintah selama itu seimbang, tanpa menghujat, menghasut dan memfitnah penguasa pada waktu itu.

Namun realitas menunjukkan, bahwa penilaian sebgaiian masyarakat di negeri ini tentang pemerintahan Orde Baru selama 35 tahun, ternyata masih banyak meninggalkan persoalan yang susah untuk diselesaikan. Bahkan setelah pemerintahan orde baru tumbang, hujatan dan fitnahan muncul dari berbagai pihak. Semua sisi negatif dari pelaksanaan pemerintahan Orde Baru bermuara pada Undang-Undang No 5 Tahun 1974 dimaksud, karena emplementasi dari Undang – Undang tersebut ada di daerah.

Terlepas dari itu semua, tidak terlalu berlebihan jika ada sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa akibat dari diberlakukannya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah :

1. Pembangunan bersifat Sentralistik
2. Perencanaan pembangunan bersifat Top Down
3. Pelaksanaan pembangunan berdasar atas komando
4. Pelaksanaan pembangunan berorientasi proyek
5. Terjadi kesejangan pembangunan diberbagai bidang, termasuk didalamnya bidang ekonomi.
6. Mengandalkan industri – industri yang berbasis sumber daya dan bahan baku import
7. Monitoring dan evaluasi pembanguan kurang berjalan dengan baik

Atas dasar beberapa akibat diatas, maka pada tahun 1999 terbitlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (yang lebih populer dengan sebutan Otonomi Daerah), Undang - Undang ini menggantikan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang dianggap sudah kurang relevan lagi dengan situasi dan kondisi daerah yang menuntut desentralisasi dalam pemerintahan.

Untuk mendukung hal tersebut pemerintah menerbitkan juga Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom, sehingga terasa lengkap piranti kebijakan yang bisa dipakai oleh pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Baru berjalan 4 tahun, undang – undang yang mengatur tentang pemerintahan Daerah ini harus mengalami revisi. Dengan revisi ini maka terbitlah Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah menggantikan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang hal yang sama. Dengan undang – Undang baru ini pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola pemerintahan yang lebih baik, transparan dan bisa dipertanggung jawabkan.

Desentralisasi merupakan kunci pokok dari undang – undang Nomor 32 Tahun 2004. disamping itu undang-undang dimaksud juga memberi harapan baru bagi masyarakat diantaranya :

1. Pembangunan bersifat desentralisasi
2. Perencanaan pembangunan bersifat Bottom Up
3. Pelaksanaan pembangunan melibatkan partisipasi masyarakat
4. Pelaksanaan pembangunan berorientasi hasil
5. Terjadi pemerataan pembangunan diberbagai bidang, termasuk didalamnya bidang ekonomi.
6. Mengandalkan industri – industri yang berbasis sumber daya dan bahan baku lokal
7. Monitoring dan evaluasi pembanguan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan sebagian besar masyarakat

Sebagai negara yang berbasis pertanian (Agraris), Indonesia perlu terus menerus memantapkan peranannya dalam pembangunan di segala bidang.

Termasuk di dalamnya pembangunan di bidang perekonomian. Menghadapi Asian Free Trade Area (AFTA), potensi alam berupa tanah, air, agroklimat dan sumber daya manusia harus lebih didayagunakan, sehingga mampu memanfaatkan peluang pasar, baik dalam negeri maupun luar negeri. Serta mampu memperluas kesempatan usaha dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru dalam rangka kesejahteraan masyarakat. (*Bungaran Saragih, 2002 hlm.1*)

Persuteraan alam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari negara yang berbasis pertanian tersebut, sebab ia merupakan kegiatan agribisnis dengan rangkaian usaha yang cukup panjang, eksistensinya sangat perlu mendapatkan prioritas pengembangan bila dikaitkan dengan kegiatan agroindustri. Selain dari pada itu kegiatan ini sudah cukup lama dibudidayakan sebagian masyarakat Indonesia. Terutama pada daerah – daerah dengan iklim, sosial dan budaya yang mendukung, seperti di Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah dan lain lain.

Indonesia memiliki potensi cukup besar untuk menghasilkan serat sutera alam. Kondisi agroklimat Indonesia cukup menguntungkan bagi pengembangan persuteraan alam. Pada musim kemarau, suhu udara di Indonesia tidak terlalu panas dan pada musim penghujan suhu udara tidak terlalu dingin. Hal tersebut sangat memungkinkan tanaman murbei sebagai pakan ulat sutera dapat tumbuh dan berkembang serta dibudidayakan sepanjang tahun. Perkembangan produksi kokon sebagai bahan satu-satunya benang sutera, dari tahun ke tahun untuk negara Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1

Perkembangan Produksi Kokon Di Indonesia

Tahun	Produksi Kokon (kg)	Perkembangan produksi kokon (%)
2000	428.137	-
2001	463.437	8,245
2002	458.530	-1,059
2003	504.137	9,944
2004	566.421	12,355

Sumber : Dirjen Rehabilitas Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS), 2005

Tanaman murbei tidak menuntut syarat tumbuh dengan spesifikasi tertentu, bahkan dapat ditanam dan tumbuh pada lahan yang kurang subur sekalipun. Demikian pula dalam budidaya ulat sutera, tehnik pemeliharaannya relatif sederhana, sekalipun memerlukan keterampilan khusus, kegiatan budidaya ulat sutera sangat terbuka bagi siapa saja yang berminat untuk mengembangkannya.

Di daerah – daerah tertentu di Indonesia, penggunaan pakaian sutera sudah sangat menonjol, seperti Sumatra Barat, Sulawesi Selatan, Samarinda, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Bali, dan Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur). Bahkan menurut pandangan peneliti, hampir semua masyarakat sudah mengenal pakaian yang terbuat dari kain sutera.

Sampai saat ini, penggunaan kain sutera sebagai bahan pakaian terus mengalami peningkatan, kondisi seperti ini harus tetap dipertahankan sebagai kekayaan budaya bangsa. Disamping itu, kecenderungan pemakai atau peminat dan penggemar kain sutera batik makin meningkat terutama di kota – kota besar.

Melihat kecenderungan tersebut, sutera merupakan komoditas yang berpeluang strategis untuk dikembangkan. Disamping karena merupakan komoditas eksklusif, dimana saat ini masih merupakan bahan baku utama, serat sutera juga belum dapat digantikan oleh serat buatan lain dalam berbagai sifat – sifatnya. Dibandingkan dengan serat alam lainnya, serat sutera alam mempunyai sifat lebih lembut, berkilau, elastis dan halus. Bila diolah menjadi bahan pakaian, sutera alam mempunyai keistimewaan sifat yaitu ringan, kuat dan menyerap air (*higroskopis*).

Keistimewaan lain dari serat sutera alam adalah sejuk bila dipakai pada waktu hawa panas dan hangat bila dipakai pada waktu hawa dingin. Hal tersebut yang menjadikan kain sutera alam harganya mahal. Bahkan berdasarkan pameran internasional di Jerman Barat tahun 1990, produk kain sutera masih tetap menjadi pilihan banyak peminat dan belum tertandingi.

Atas dasar spesifikasi tersebut, maka berdasarkan data yang peneliti peroleh, kebutuhan benang sutera alam baik dalam negeri maupun luar negeri dari waktu ke waktu selalu mengalami kenaikan. Bahkan proyeksi permintaan benang sutera nasional juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Pada tahun 1994, kebutuhan benang sutera dunia diperkirakan sebesar 92.743 ton per tahun, sedangkan produksinya baru mencapai 83.393 ton (*FAO,1994*). Pertumbuhan akan benang sutera dunia diramalkan mencapai 2 % sampai 3 % per tahun dari tingkat produksi yang sudah ada (*ISA,1995*). Namun ada juga yang meramalkan sampai dengan 5 % per tahun (*FAO, 1994*). Dan di Indonesia sendiri diperkirakan tingkat pertumbuhannya mencapai 12,24 % dari produk yang sudah di capai (*Sri Utami Kuncoro, 2000*). Bahkan proyeksi sampai dengan tahun 2007, dapat dilihat pada tabel 1.2

Tabel 1.2
Proyeksi Permintaan Benang Sutera Dalam Negeri
Sampai Dengan Tahun 2007

No	Tahun	Proyeksi permintaan (Kg)
01	2003	215.000
02	2004	229.000
03	2005	246.000
04	2006	258.000
05	2007	263.000

Sumber : SAMBA Project, Juni 2003

Memasuki dasawarsa 80-an dan 90-an, terjadi perubahan – perubahan mendasar. Perubahan tersebut adalah negara produsen beralih menjadi negara pengolah, karena kemakmuran yang meningkat, membuat masyarakatnya mampu membeli sutera, maka negara tersebut menjadi negara konsumen sutera. Perubahan tersebut seperti yang terjadi di Negara Jepang dan Korea, sedangkan Cina dan India sedang dalam proses perubahan.

Jepang yang semula merupakan negara produsen terbesar sutera alam, kini berubah menjadi negara konsumen terbesar sekaligus importir sutera alam, karena kemampuan produksinya yang jauh menurun. Cina sebagai produsen utama sutera alam dunia, kini mulai mengurangi dan membatasi ekspor sutera alam dalam bentuk bahan mentah, seperti kokon dan benang sutera. Konsumsi sutera di Cina meningkat seiring dengan meningkatnya kamakmuran rakyatnya.

India mengalami peningkatan pasar domestik dengan konsumsi sutera mencapai 85 % dari total produksi sutera alam dalam negeri (*ISA, 1995*). Di Eropa permintaan kokon dan benang sutera meningkat setelah Cina membatasi ekspor benang sutera. Peningkatan kebutuhan benang sutera negara – negara Eropa dari 30 gram per kapita per tahun menjadi 100 gram per kapita per tahun (*ISC, 1994*).

Akibat dari perubahan – perubahan tersebut supply kokon dan benang sutera dunia semakin tidak dapat memenuhi permintaan dari negara – negara konsumen. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, konsumen sutera berpaling ke Amerika Serikat dan Asia. Terutama Asia Tenggara termasuk di dalamnya Indonesia.

Dengan adanya peluang dan banyaknya daerah yang cocok untuk kegiatan persuteraan alam di Indonesia, sesuai dengan kondisi fisik dan biofisik, sosial ekonomi dan sosial budaya, maka usaha persuteraan alam dapat dikembangkan di Indonesia. Untuk itu Departemen Kehutanan dan Perkebunan melalui Dirjen Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan (RRL) pada tahun 1986 mulai mengadakan program pengembangan persuteraan alam dengan kegiatan reboisasi lahan yang

dikombinasikan dengan pemeliharaan ulat sutera dan penanganan pasca panennya (*Sri Utami Kuncoro, 2000*).

Adapun daerah – daerah yang mengembangkan budidaya ulat sutera Indonesia, antara lain Sulawesi selatan, Sumatera barat, Jawa barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur dan lain sebagainya (*Dirjen. RLPS, 2000*).

Sebagaimana di Kabupaten / Kota lain di Indonesia, sejak tahun 1989 Kabupaten Wonosobo mulai mengembangkan budidaya ulat sutera. Bahkan berdasarkan data dari Forum For Economic Development and Employment Promotion (FEDEP) Kabupaten Wonosobo, dari tahun ke tahun jumlah petani yang berbudidaya ulat sutera selalu mengalami peningkatan, sehingga kabupaten ini layak untuk mendapatkan perhatian besar dari berbagai pihak termasuk pemerintah sebagai fasilitator pengembangan.

Pemilihan Kabupaten Wonosobo sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa 1). Kabupaten Wonosobo sejak tahun 1989 telah mengembangkan budidaya ulat sutera yang dipromotori oleh Dinas kehutanan dan perkebunan. 2). Dari tahun ke tahun jumlah petani yang berbudidaya ulat sutera mengalami peningkatan dan 3). Kabupaten Wonosobo menjadi satu satunya Kabupaten di Indonesia yang mengembangkan budidaya ulat sutera melalui program KPEL.

Atas dasar pertimbangan latar belakang di atas, maka peneliti memiliki keinginan untuk memberikan saran dan masukan baik kepada pemerintah, dalam

hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wonosobo dan masyarakat pada umumnya, dalam rangka pengembangan budidaya ulat sutera pada masa mendatang. disamping itu pemerintah telah memberikan bantuan kepada para petani di Kabupaten Wonosobo tersebut melalui Program Kemitraan Bagi Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL).

Program Kemitraan Bagi Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL) merupakan suatu program pembangunan di daerah yang bertumpu pada pengembangan lintas sektor melalui suatu cluster komoditas yang menjadi prioritas unggulan daerah. klaster komoditas ini diusahakan dalam aktivitas ekonomi masyarakat lokal yang kegiatannya biasa disebut kompetensi ekonomi lokal. Guna mendukung keberhasilan pengembangan cluster komoditas yang memiliki kompetensi ekonomi lokal tersebut, pelaksanaan program KPEL juga dilandasi oleh upaya untuk mengembangkan kemampuan kelembagaan , pengembangan jaringan kemitraan usaha dan pasar, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilaksanakan dalam kerangka pemberdayaan bagi daerah.

Disamping itu program KPEL merupakan sebuah tawaran kongkrit bagi daerah dalam membantu menyelesaikan masalah - masalah pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan masalah penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan antar sektor dan daerah, karena program ini didesain dengan kekhasan berupa : 1). Pengembangan kerjasama unsur – unsur Pemerintah – Swasta dan Masyarakat (Tripartit). 2). Keterkaitan ekonomi desa – kota, melalui keterkaitan sektor pertanian di pedesaan dan sektor industri di perkotaan

(Coupled). 3). Mengkombinasikan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif daerah yang berbasis klaster ekonomi yang bermuara pada peningkatan daya saing komoditas unggulan daerah dan 4). Diikat oleh sistem nilai yang berkembang dan menjadi modal social sebagai karakteristik lokal yang akan menjamin sustainability rencana aksi. Betapapun hebatnya suatu desain program tanpa adanya komitmen, kesadaran dan kepercayaan diri berbagai pihak yang terlibat (*Stakeholder*) maka upaya yang dilakukan hanya merupakan kemubadziran semata (*Tatag Wiranto, 2002, hlm.2*)

1.2. Perumusan Masalah

Program Kemitraan Bagi Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL) adalah merupakan program dari pemerintah pusat yang diimplementasikan di daerah Kabupaten/Kota. Program ini diharapkan mampu menjadi motivator dan stimulan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan ekonomi lokal. Kabupaten Wonosobo memilih Budidaya Ulat Sutera sebagai Klaster produk yang dikembangkan melalui program KPEL. Pemerintah baik pusat, Propinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten Wonosobo terlibat dalam implementasi program KPEL ini, tentunya sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Pemerintah pusat, memberikan fasilitasi kepada Kabupaten Suport Unit (KSU) sebagai tenaga yang diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal. Pemerintah Propinsi memberikan bantuan dana untuk mendukung implementasi program KPEL di Kabupaten Wonosobo, dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo memberikan dana

pendampingan sesuai dengan kemampuan daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Yang menjadi persoalan disini adalah, apakah seimbang antara in put (dana) yang dikeluarkan pemerintah baik pusat, propinsi dan kabupaten, dengan out put (hasil) yang dicapai oleh petani budidaya ulat sutera. Terutama pada peningkatan pendapatan mereka. Tidak terlalu berlebihan jika pertanyaan diatas dikemukakan, sebab tidak semua program – program yang dikelola pemerintah bisa berhasil sesuai dengan tujuan semula, bahkan ada yang kurang dari 50 % tingkat keberhasilannya.

Program – program pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat seperti program KPEL sangat banyak ragamnya seperti : 1). Program Pengembangan Kecamatan (PPK). 2). Inpres Desa Tertinggal (IDT) Program Pengembangan Ekonomi Lokal (PPEL). 3). Kemitraan bagi Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL) 4). Kredit Usaha Tani (KUT) 5). Pemberdayaan Masyarakat Daerah Pesisir (PMDP) 8) Sumbangan Langsung Tunai (SLT) Dan masih banyak lagi program- program pemerintah yang mengatasnamakan pengentasan kemiskinan, dinamakan pelaksanaannya menuntut keterlibatan / melibatkan masyarakat sebagai penerima program.

Program - program diatas tentunya ada yang berhasil dan ada yang kurang berhasil bahkan mungkin ada yang tidak berhasil. Berdasarkan , berdasarkan pada hal ini masuk kategori manakah program KPEL ini, apakah masuk kategori yang berhasil, kurang berhasil atautkah yang tidak berhasil. Jika masuk ketegori yang berhasil, sejauhmana pengaruh program KPEL ini terhadap peningkatan

pendapatan petani budidaya ulat sutera di Kabupaten Wonosobo. inilah yang menjadi konsentrasi dan spesifikasi yang akan diteliti dalam penelitian ini.

1.3. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan program KPEL bagi petani budidaya ulat sutera di Kabupaten Wonosobo.

b. Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh program KPEL terhadap peningkatan pendapatan petani budidaya ulat sutera di Kabupaten Wonosobo.

1.3.2 Manfaat Hasil Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran sebagai karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan, sehingga mampu menambah hazanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Pusat dan Daerah hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam rangka pengambil kebijakan

dan keputusan mengenai program KPEL agar dapat sesuai dengan kondisi riil dalam pelaksanaannya serta dapat mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam implementasi program KPEL di masa mendatang.

2. Bagi Petani, dalam upaya pemanfaatan program KPEL secara maksimal dalam rangka mengembangkan budidaya ulat sutera guna meningkatkan pendapatan.
3. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan bisa dipakai sebagai referensi dan wawasan dalam penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsayad, 1997)

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses. Yaitu proses yang mencakup pembentukan intuisi-intuisi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk

menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Keadaan sosial ekonomi yang berbeda dari setiap daerah akan membawa implikasi bahwa cakupan campur tangan pemerintah untuk tiap daerah berbeda pula. Perbedaan tingkat pembangunan antar daerah, mengakibatkan perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah, dan kalau hal ini dibiarkan dapat menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi suatu negara. Gagasan ini timbul setelah melihat kenyataan bahwa, kalau perkembangan ekonomi diserahkan pada kekuatan mekanisme pasar, biasanya cenderung untuk memperbesar dan bukannya memperkecil ketidakmerataan antar daerah, karena kegiatan ekonomi akan menumpuk di tempat-tempat dan daerah tertentu, sedangkan tempat-tempat atau daerah lainnya akan semakin ketinggalan. Memutusnya ekspansi ekonomi di

suatu daerah disebabkan berbagai hal, misalnya kondisi dan situasi alamiah yang ada, modal perdagangan akan pindah ke daerah yang melakukan ekspansi tersebut. Khususnya migrasi tenaga kerja, biasanya bersifat selektif, akibatnya migrasi itu sendiri pun cenderung untuk menguntungkan daerah-daerah yang sedang mengalami ekspansi ekonomi tersebut dan merugikan daerah-daerah lain.

Sesuai dengan pendapat Myrdal ini lebih besar di atas Hirschman (1958) juga mengemukakan bahwa jika suatu daerah mengalami perkembangan, maka perkembangan itu akan membawa pengaruh atau imbas ke daerah lain. Menurut Hirschman, daerah di suatu negara dapat dibedakan menjadi daerah kaya dan daerah miskin. Jika perbedaan antara kedua daerah tersebut semakin menyempit berarti terjadi imbas yang baik (*trickling down effects*). Sedangkan jika perbedaan antara kedua daerah tersebut semakin jauh berarti terjadi proses pengkuburan (*polarization effects*). Akibat-akibat yang kurang menguntungkan bagi daerah-daerah miskin adalah :

1. daerah-daerah miskin tersebut akan mengalami kesulitan dalam membangun sektor industrinya dan dalam memperluas kesempatan kerja. Penduduk akan berkembang lebih cepat, sehingga pendapatan per kapita penduduk akan semakin rendah dan kemudian akan diikuti dengan semakin banyaknya pengangguran.
2. Daerah-daerah miskin tersebut akan sulit merubah struktur ekonominya yang tradisional, sehingga senantiasa akan biasa ke arah pertanian, sedang untuk membangun sektor industri dihadapi

banyak kesulitan, seperti kurangnya pengusaha yang kreatif dan kurangnya tenaga terampil.

3. Karena sempitnya kesempatan kerja di daerah miskin tersebut maka akan terjadi perpindahan tenaga kerja ke daerah maju, terutama tenaga kerja yang masih muda, yang berjiwa dinamis, dan yang mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga yang tetap tinggal di daerah miskin hanya tenaga kerja yang produktivitasnya rendah.

Agar pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil maksimal, maka diperlukan perencanaan yang baik dan matang serta melibatkan semua unsur yang merupakan representasi stakeholder daerah.

Ada 3 (tiga) implikasi pokok dari perencanaan ekonomi daerah.

Ketiga implikasi dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang realistis memerlukan pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional di mana daerah tersebut merupakan bagian darinya, keterkaitan secara mendasar antara keduanya, dan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut.
2. Sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah, dan sebaliknya yang baik bagi daerah belum tentu baik secara nasional.

Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah-daerah. Misalnya administrasi, proses pengambilan keputusan, otoritas biasanya sangat berbeda pada tingkat daerah dengan yang tersedia pada tingkat pusat. Selain itu derajat peendalian kebijakan sangat berbeda pada dua tingkat tersebut. Oleh karena itu, perencanaan daerah yang efektif harus bisa membedakan apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang dapat dilakukan, dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya pembangunan sebaik mungkin yang benar-benar dapat dicapai, dan mengambil manfaat dari informasi yang lengkap yang tersedia pada tingkat daerah karena kedekatan para perencanaannya dengan obyek perencanaan.

Teori – teori pembangunan ekonomi daerah sebagaimana yang telah dikemukakan L. Aryat, dalam buku ekonomi pembangunan adalah : Teori Ekonomi Neo Klasik, Teori Basis Ekonomi (*Economic Basic Theory*), Teori Lokasi, Teori Tempat Semtral, Teori Kausasi Kumulatif dan Teori Model daya tarik (*Attraction*), (Arsyad 1997), untuk mendukung dan memperkuat teori – teori tersebut peneliti mengemukakan teori Perubahan Sosial yang ditulis Joe Holand Petere Henriot S.J. dan teori Sumber Daya Manusia yang ditulis Bintooro Tjokroamidjoyo sebagai berikut :

2.1.1.1 Teori Perubahan Sosial

Arah dan tujuan pembangunan ekonomi daerah adalah adanya perubahan. Perubahan dikasud adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik. Untuk menuju ke arah

tersebut ada 3 (tiga) model interpretasi tentang dinamika perubahan dalam masyarakat : *Model Tradisional, Model Liberal dan Model Radikal.*

Model Tradisional, Secara histories, model tradisional untuk menafsirkan perubahan social atau dinamika masyarakat telah menjadi model yang dominan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pandangan tradisional sama sekali bukanlah perubahan. Struktur masyarakat tetap tinggal seperti se4dia kala, seperti apa yang selalu ada, model ini merupakan model siklis, organis dan otoritarian. Metafor penafsiran dasar yang digunakan adalah corak “Biologis” (memandang masyarakat sebagai organisme yang analog dengan tubuh manusia).

Menurut model ini, waktu sosial berlangsung menurut pola biologis. Oleh karena itu bersifat siklis. Memang ada perubahan di dunia ini, tetapi perubahan itu secara tetap hanya mengulangi pola-pola yang sama dengan bergerak menurut langkah – langkah siklis yakni : lahir, dewasa dan mati. Perubahan menurut irama alam itu sendiri, masa lalu, hari ini dan masa depan diintegrasikan dalam keseluruhan siklus histories yang tunggal.

Implikasi dengan masalah pembangunan ekonomi daerah yang bermuara kepada masalah pemberdayaan masyarakat (pengentasan kemiskinan), Model Tradisional, menekankan tantangan yang dating dari gerakan kaum miskin. Tuntutan mereka bagi perubahan ditolak. Struktur social tetap tinggal seperti apa yang ada. Mempermnasalahkan korban (yaitu orang – orang miskin itu sendiri). Hal ini merupakan fenomena yang lumrah. Kita seringkali diingatkan bahwa “orang miskin selalu ada”

kebanyak pilitikus konservatif mendukung garis ini. Dan gerakan intelektual “Neo Konservatif” sudah mencoba memberi penghargaan dengan menyatakan perlunya ada “pengharapan sedikit” (yang sifatnya dasar saja).

Model Liberal, Secara umum model liberal telah mengganti model tradisional, konsep – konsep seperti pragmatisme dan pluralisme sangat penting dalam model ini. Model ini tidak menantannng perubahan atau kembali lagi ke era keemasan masa lalu, lebih dari itu model liberal berorientasi masa depan yang akrab dengan perubahan. Diungkapkan secara sederhana, model liberal memandang masyarakat terus mengalir dan arus peristiwa terus menerus itu mempengaruhi tata social yang menonjol. Meskipun demikian kejadian itu pada dasarnya tidak mengubah struktur.

Model liberal berciri evolusioner, pluralistic, dan manajerial. Metafor intepretasi dasarnya bersifat mekanistis. Presis seperti model tradisional mendasarkan diri pada biologi klasik, dengan menggunkan pola – pola sama seperti yang kita lihat dalam melihat model tradisional.

Menurut model ini, waktu social bersifat linier atau evolusioner. Gerak sejarah bukan siklis, tetapi progresif, perubahan dipandang sebagai “kemajuan” kemajuan berjalan menurut kontinum dimana masyarakat setahap demi setahap melangkah maju dan meningkat. Gerakan masyarakat mengikuti kontinum itu, masa lalu dalam model ini dipandang sebagai musuh masa depan, masa lalu hanya akan menghalangi perubahan dan menghambat kemajuan.

Implikasi dengan masalah pembangunan ekonomi daerah yang bermuara kepada masalah pemberdayaan masyarakat (pengentasan kemiskinan), Model liberal mengakui perlunya suatu perubahan, agar system yang ada tetap bertahan. Masalah keseimbangan dan konflik harus diatur, jika tidak diatur dapat membahayakan. Pembangunan “urban” dirancang untuk mengatui lapangan kerja yang lebih banyak. Program pendidikan dan perbaikan harus dimulai di baik daerah – daerah miskin, kota maupun desa. Perusahaan didorong untuk mengadakan latihan kerja.

Kebijaksanaan “Perang melawan kemiskinan” seperti yang diambil Presiden Lyndon Johnson merupakan suatu jawaban liberal yang penting terhadap problem-problem sosiaal ekonomi. Meskipun demikian kemerosotan yang cepat memunculkan berbagai masalah serius. Tidak hanya mengenai efektifitas program-program yang dilakukan, tetapi juga tentang validitas prinsip dasar yang menggerakkannya.

Model Radikal. Menurut model ini masyarakat bergerak melalui kurun sejarah seperti geloimbang dengan bentuk – bentuk baru yang muncul dari kontradiksi – kontradiksi bentuk lama. Bentuk – bentuk yang lama hilang, dan tak satupun nampak lagi. Transformasi system yang mendasar terjadi. model radikal merupakan sebuah model yang berciri transformatif, interdependen dan partisipatif.

Model ini memandang waktu sosial bersifat transformatif, jika kodel tradisional melihat masyarakat sebagai tak berubah, model liberal melihat masyarakat swelalu berubah namun tanpa perubahan struktur mendasar,

maka model radikal melihat transformasi mendasar terjadi justru dalam struktur sosialnya, sebagaimana peristiwa sejarah secara fundamental menimbulkan tahap baru. Ada kaitan histories antara masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang, tetapi merupakan kaitan dialektis, melalui dialektika itu tahapan-tahapan muncul dari tahap – tahap lain lewat proses konflik yang kreatif.

Implikasi dengan masalah pembangunan ekonomi daerah yang bermuara kepada masalah pemberdayaan masyarakat (pengentasan kemiskinan), Model radikal melihat, bahwa masalah – masalah structural serius tidak dapat diperbaiki dengan hanya sekedar penyesuaian dalam system itu sendiri. Penyembuhan atas “Penyakit social” adalah transformasi structural yang luas. Misalnya : modal dan teknologi sebagai motor ganda perekonomian secara langsung harus ditata sebagai tanggung jawab terhadap masyarakat. Model radikal masalahnya bukan pada jumlah industrialisasi atau angka pertumbuhan, tetapi pada masalah produksi dan distribusi. Model ini diharapkan mampu membuat bangkitnya berbagai unsure pendekatan alternatif bagi pengembangan ekonomi. (*Joe Holand Petere Henriot S.J.1990*)

2.1.1.2 Teori Sumber Daya manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peranan yang sangat vital untuk menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Tanpa SDM, Sumber Daya Alam (SDA), dan factor – factor lain tidak berguna atau bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sebagai contoh : pendekatan atas

dasar “COR – Model”, ternyata melahirkan hasil-hasil pembangunan yang tidak diharapkan. Ini disebabkan karena “COR – Model” mendorong kepada pilihan alternatif “*capital intensive*” untuk mencapai laju pertumbuhan yang tinggi dengan berbagai implikasinya. Disamping itu, terjadinya pasar yang bersifat oligopolistik yang dikuasai oleh perusahaan raksasa luar negeri, sehingga swasta pribumi makin sempit ruang gerakannya. Deviasi yang timbul kemudian dicoba diatasi dengan gagasan “model padat karya”

Menurut Hidayat konsep ini tetap tergantung pada modal. Hanya rasio modal yang diubah. Sikap yang selalu menggantungkan pada modal mempunyai implikasi negatif sebagai berikut : Pertama, Karena modal didatangkan dari luar negeri, maka perekonomian nasional makin sensitive dengan pasang surut ekonomi dunia. Kedua. Menciptakan sikap mental “*economic animal*” yang akan berarti mengulangi kesalahan – kesalahan kapitalisme yang terjadi di negara – negara beberapa abad yang lalu.

Apabila investasi terkonsentrasi kepada meningkatkan “*Physical Capital Stok*” dengan pembangunan atas dasar “COR – Model” mengakibatkan berbagai dilemma social ekonomi, sedangkan ternyata perbaikan “*Human Factor*” memberikan kontribusi yang besar bagi kenaikan laju pembangunan seperti diungkapkan antara lain oleh Febricant diatas. Maka timbul teori pembangunan ekonomiu atas dasar pendekatan “Pengembangan Sumber Daya Manusia”

Dalam teori ini, meningkatkan mutu sumber daya manusia dipandang sebagai kunci bagi pembangunan yang dapat menjamin

kemajuan ekonomi dan kestabilan social. Oleh sebab itu investasi harus diarahkan bukan saja untuk “*Physical capital stock*” tetapi harus diarahkan juga untuk “*Human capital stock*” dengan mengambil prioritas kepada usaha mutu pendidikan (termasuk didalamnya pelatihan dan pemagangan bagi pelaku ekonomi). Dengan perbaikan mutu sumber daya manusia maka akan tumbuh pula inisiatif – inisiatif dan sikap kewiraswastaan, akan tumbuh pula lapangan kerja baru, dengan demikian produktifitas nasional akan meningkat. “kalau pembangunan telah dapat menciptakan manusia yang memiliki sifat diatas, baru peranan modal (dalam arti Capital stock) dan teknologi yang sesuai mempunyai manfaat yang besar.

Tampak kiranya bahwa salah satu tujuan dari teori pengembangan sumber daya manusia adalah tumbuhnya wiraswasta, yang memang peranannya dalam pembangunan sudah diakui sejak lama. Sejak Adam Smit hingga Scumpeter, Max Weber dan David Clelland, “Melihat adanya tenaga kreatif dan dinamis dalam proses pembangunan ekonomi. Yaitu kewiraswastaan” Kemudian Prof. Raepke secara jelas mengemukakan pula hubungan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kewiraswastaan sebagai berikut : “Suatu bangsa akan berkembang secara ekonomis, apabila bangsa tersebut mempunyai wiraswasta – wiraswasta yang mempunyai kebebasan dan motif – motif yang mendorongnya untuk mengambil keputusan yang bersifat kewiraswastaan yaitu mewujudkan gagasan baru dalam praktek.

(Bintooro Tjokroamidjoyo,1980)

2.1.2. Program Kemitraan Bagi Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL)

Pengembangan ekonomi lokal merupakan suatu konsep pembangunan ekonomi daerah yang didasarkan pada pendayagunaan sumber daya lokal yang ada pada suatu masyarakat, baik sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya kelembagaan (SDL). Pendayagunaan sumber daya tersebut dilakukan oleh masyarakat itu sendiri bersama pemerintah lokal maupun kelompok-kelompok kelembagaan berbasis masyarakat yang ada. Keutamaan pada pengembangan ekonomi yang berorientasi atau berbasis lokal ini penekanannya pada proses peningkatan peran dan inisiatif masyarakat lokal dalam pengembangan aktifitas ekonomi serta peningkatan produktivitas.

Pengembangan ekonomi lokal menitikberatkan pada pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dirancang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setiap komunitas atau wilayah. Kesesuaian ini membuat efektif dan berhasil dalam menjawab permasalahan kesejahteraan rakyat, dibanding dengan solusi - solusi yang bersifat global. Setiap upaya pengembangan ekonomi lokal mempunyai tujuan utama, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus bersama - sama mengambil inisiatif dalam pengembangan ekonomi lokal yang dapat dilakukan melalui suatu forum kemitraan. Kemitraan yang dimaksud dalam hal ini adalah adanya kebersamaan antara pemerintah- swasta - masyarakat dalam menentukan

arah, rencana dan melaksanakan pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah beserta masyarakat dan swasta harus mampu secara efektif menggunakan sumberdaya - sumberdaya yang ada, dan mengidentifikasi sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Konsep kemitraan yang selama ini dikenal adalah merupakan suatu hubungan kerjasama antar usaha yang sejajar dilandasi dengan prinsip saling menunjang dan saling menghidupi berdasarkan asas kekeluargaan dan kebersamaan. Kemitraan usaha ini merupakan strategi bisnis, pelaku-pelaku yang terlibat langsung harus memiliki dasar-dasar etika bisnis yang dipahami dan dianut bersama sebagai titik tolak dalam menjalankan kemitraannya.

Beberapa jenis usaha yang dijalankan dalam program KPEL ini antara lain

- a. Pola Inti Plasma : Adalah merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra. Penerapannya banyak dilaksanakan pada kegiatan agribisnis usaha perkebunan.
- b. Pola Sub Kontrak : Adalah merupakan hubungan kemitraan antara perusahaan dengan kelompok mitrasaha yang memproduksi kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan sebagai bagian dan komponen produksinya.
- c. Pola Dagang Umum : Adalah merupakan hubungan kemitraan usaha yang

memasarkan hasil dengan kelompok usaha yang mensuplai kebutuhan yang diperlukan perusahaan.

- d. Waralaba : Adalah merupakan buhungan kemitraan antara kelompok mitra usaha dengan perusahaan mitra usaha yang memberikan hak lisensi, merek dagang saluran distribusi perusahaannya kepada kelompok mitra usaha sebagai penerima waralaba yang disertai dengan bantuan bimbingan manajemen.

Kemitraan yang dimaksud dalam program ini berbeda dengan konsep-konsep kemitraan diatas, karena kemitraan yang dimaksud bukanlah sekedar kemitraan usaha belaka. Kemitraan yang dimaksud dalam program ini adalah lembaga kemitraan antara publik (pemerintah) Swasta (dunia usaha) dan masyarakat. Lembaga Kemitraan yang dimaksud beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah - swasta - masyarakat. Lembaga Kemitraan ini diharapkan mampu menjadi katalis bagi penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui kegiatan yang terkait dengan pengembangan ekonomi lokal.

Program Kemitraan Bagi Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL) adalah merupakan sebuah konsep yang berusaha mengintegrasikan berbagai potensi sumberdaya dan aktivitas yang dimiliki oleh segenap stakeholder pada suatu wilayah, dan membangun jaringan kerja untuk mengembangkan ekonomi wilayah tersebut, alat/cara yang digunakan adalah dengan menggunakan komoditas yang potensial dalam mengisi peluang dipasaran ekspor serta potensial dalam mendorong ekonomi wilayah, penyerapan

kesempatan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah tersebut. Untuk mengimplementasikan konsep tersebut dikembangkan lembaga kemitraan antara pemerintah - swasta - masyarakat.

Lembaga kemitraan yang dibentuk adalah yang melibatkan seluruh komponen lapisan masyarakat. Disini dimaksudkan agar kemitraan tersebut berjalan dinamis dan dapat memberikan dampak yang baik bagi pengembangan ekonomi lokal. Agar terjadi sinergi kerja yang serasi, maka semua stakeholder termasuk pemerintah ikut aktif dalam kemitraan, dengan kemitraan maka kepentingan masyarakat dapat terakomodasi. Dalam kemitraan ini pemerintah memfasilitasi kepentingan masyarakat maupun kepentingan sektor swasta.

Kemitraan yang sering digunakan dalam pengembangan ekonomi lokal mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1. Memiliki tujuan untuk pengembangan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada wilayah yang relatif terbelakang dan rumah tangga miskin.**
- 2. Bersifat tidak eksklusif serta merupakan badan pengambil keputusan yang otonom, independent dan tidak terikat dengan pemerintah. Disamping itu, Kemitraan dalam pengembangan ekonomi lokal didasari dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).**
- 3. Anggotanya merupakan perwakilan produsen berskala kecil (termasuk : petani, nelayan, peternak, pengrajin dan lain-lain),**

pengusaha lokal, pedagang, tokoh masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, Pemerintah.

- 4. Eksistensinya bukan sebagai alat pemerintah atau kepentingan golongan atau kelompok tertentu.**
- 5. Tidak secara langsung terlibat dalam aktifitas komersial**
- 6. Tidak mewakili kepentingan khusus dari suatu golongan secara tersendiri.**

Kemitraan bagi pengembangan ekonomi lokal ini diharapkan mampu berfungsi sebagai penampung aspirasi para anggota kemitraan tersebut. Hal ini perlu diingat karena salah satu fungsi dari lembaga kemitraan adalah harus mampu mencerminkan keikutsertaan para anggotanya dan mengikutsertakan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan diwilayahnya.

2.1.2.1. Tujuan Program KPEL

Program Kemitraan bagi Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL) ini memiliki tujuan, baik tujuan jangka panjang maupun jangka pendek. Kedua tujuan dimaksud adalah

1. Tujuan Jangka Panjang,
 - a. Meningkatkan pengembangan ekonomi lokal dilokasi terpilih**
 - b. Meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja di lokasi terpilih**
 - c. Meningkatkan pola pembangunan yang seimbang dalam rangka pengembangan ekonomi lokal.**

- d. Memberikan suatu model pemerintahan yang partisipatif dan akuntabel, serta pendekatan pada dunia usaha untuk memberikan masukan bagi aktivitas pemerintah.**
2. Tujuan Jangka Pendek
- a. meningkatkan dan menguatkan kemampuan stakeholder (lokal dan nasional) dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal.**
 - b. Mendokumentasikan, menginformasikan, dan meyakinkan stakeholder tentang konsep, strategi, manfaat dan metodologi dari program KPEL.**
 - c. Meningkatkan pengembangan ekonomi lokal melalui pengembangan klaster aktivitas ekonomi dan pasar.**
 - d. Meningkatkan kapasitas kelompok petani, nelayan dan pengrajin.**
 - e. Memobilisasi dukungan dan sumberdaya dalam mendorong aktivitas ekonomi lokal**
 - f. Menguatkan dan mengembangkan sistem informasi KPEL dalam mendukung aktivitas pengembangan ekonomi lokal.**
 - g. Mengembangkan dana mengimplementasikan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif dan mudah digunakan.**

2.1.2.2. Memulai Kemitraan KPEL

Sebelum membangun forum kemitraan, perlu dipahami prinsip dari kemitraan dalam program KPEL, antara lain ;

- a. Tidak merupakan duplikasi. Kemitraan tidak boleh menduplikat kelembagaan/badan yang sudah ada yang juga bertujuan untuk pengembangan ekonomi daerah. Dalam hal ini kemitraan KPEL dirancang untuk melengkapi badan yang sudah ada, dan diusahakan badan tersebut dapat menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip kemitraan KPEL.
- b. Ada kebutuhan untuk kemitraan, sejalan dengan semangat KPEL, dan untuk memperkuat rasa kepemilikan, pihak-pihak yang tertarik harus berinisiatif sendiri dalam membentuk kemitraan.
- c. Kesetaraan mitra. Kemitraan harus dibentuk sedemikian rupa sehingga wakil-wakil sektor swasta dan masyarakat duduk sejajar dengan pihak pemerintah dalam mengambil keputusan dan menjalankan tanggung jawabnya.
- d. cakupan pada pelaku seluas mungkin. Kemitraan wajib melibatkan wakil-wakil swasta dan masyarakat dari berbagai bidang, terlebih kelompok yang selama ini tidak mendapat suara dalam rapat-rapat berbagai forum.

Ada 3 (tiga) tahapan yang perlu dilakukan dalam membangun forum kemitraan KPEL, yaitu :

1. Tahap Pengenalan

Pada fase pengenalan ini, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah :

- a. Identifikasi Stakeholder. Langkah awalnya para kader penggerak ekonomi lokal mengambil inisiatif untuk melakukan identifikasi calon-calon anggota forum kemitraan yang dinilai memiliki komitmen kuat membangun ekonomi daerahnya serta memiliki kapasitas dan daya pengaruh kuat dalam masyarakat. setelah didaftar calon-calon anggota

forum kemitraan tersebut melakukan *brainstorming* tentang problem dan solusi ekonomi lokalnya. Dari sini kemudian akan muncul perlunya kerja sama untuk membangun kebersamaan dari seluruh elemen untuk ikut berpartisipasi dalam merumuskan dan berbuat bagi pembangunan (ekonomi) daerahnya. Dengan demikian pada tahap ini perlu ditumbuhkan *minta (desire)* terlebih dahulu sebagai modal dasar membangun komitmen.

- b. Desain Struktur. Calon-calun anggota forum kemudian merumuskan syarat-syarat.
 - c. Yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota dan pengurus forumj kemitraan KPEL. Barangkali yang perlu diperhatikan dalam penyusunan syarat-syarat keanggotaanforum kemitraan adalah menghindari sedini mungkin masuknya *free riders* agar komitmen dan kebersamaan yang dibangun tidak rusak akibat salah satu elemen lebih mendahulukan motif ekonomi ketimbang motif sosialnya.
 - d. Penetapan Calon Anggota. Setelah calon anggota diinventarisir, kemudian dilakukan seleksi sesuai dengan kriteria yang dibangun, sehingga diperoleh daftar calon-calun anggota yang memiliki kapasitas dan daya kohesi yang memadai.
2. Tahap Implementasi
- Ada 6 (enam) aktivitas yang harus dilakukan oleh forum kemitraan KPEL dalam fase implementasi ini yaitu :

- a. Draft Kesepakatan. hasil dari fase I (inisiasi) masih perlu disempurnakan rumusannya menjadi draft kesepakatan dari anggota forum kemitraan. rumusan ini merupakan hasil penyempurnaan, agar tidak ada satupun aspirasi dari anggota forum yang tidak sepakat.
- b. Kesepakatan Forum. rumusan tentang deklarasi, visi, misi dan tujuan, aturan main dan sebagainya perlu mendapatkan pengesahan dari seluruh anggota forum dan ditandatangani. Penandatanganan ini diperlukan gar dikemudian hari tidak timbul *conflict of interest* yang akan merusak sendi-sendi kebersamaan dan kesepakatan.
- c. Jika forum telah menyusun Anggaran Dasar (AD) dan Rumah Tangga (ART), termasuk aturan pengelolaan organisasi, maka untuk dapat berhubungan dengan pihak ekstern diperlukan legalitas forum. Legalisasi kelembagaan bisa didapat dari dari SK Bupati, ketua Bappeda, atau dibuat tersendiri dari Badan Pelaksana Forum (SK Intern). Akan tetapi harus diingat, bahwa legalitas bukanlah yang utama, karena tanpa legalitas pun pada tahap-tahap awal, forum kemitraan KPEL sudah dapat berbuat untuk ikut membangun ekonomi lokal.
- d. Arah dan fokus kerja dari forum kemitraan jelas dan terukur, forum perlu merumuskan agenda kerja baik dalam jangka pendek (1 tahun) maupun untuk kerja forum dalam jangka panjang (5 tahunan)
- e. Langkah selanjutnya adalah melaksanakan agenda kerja tersebut sesuai dengan rencana, sambil mengevaluasi setiap hasil yang dicapai apakah telah mengarah pada tujuan yang ingin dicapai atau belum;

f. *Mobilisasi jaringan kerja*. Pada langkah ini, forum kemitraan mulai mengembangkan diri untuk bekerjasama dengan berbagai pihak untuk membantu pengembangan usaha klater komoditas daerah. Karena bagaimanapun, essensi kemitraan KPEL terletak pada kekuatan jaringan kerja (*net working*) yang dibangunnya.

3. Tahap Pelembagaan

Pada fase ini, asumsi yang mendasarnya adalah keanggotaan forum tetap solid, konflik horizontal dapat diselesaikan dengan mufakat musyawarah: sumber daya terkelola secara profesional dan forum terlembagakan. Pada fase ini langkah-langkah selanjutnya yang perlu dipersiapkan adalah :

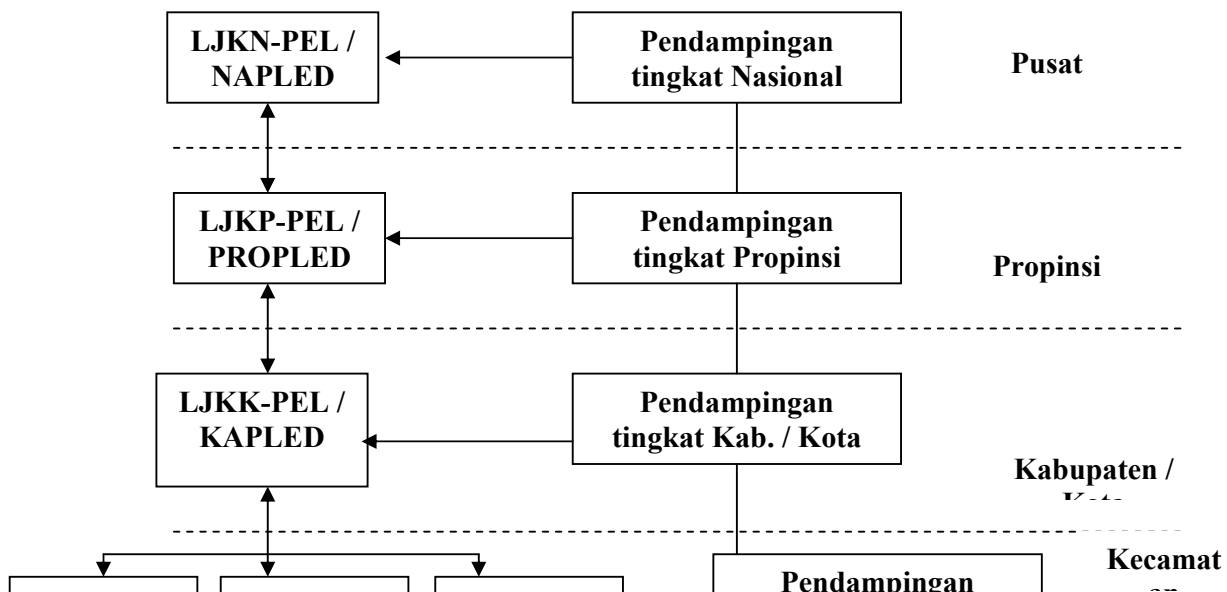
- a. *Design Kelembagaan*. Kelembagaan pada dasarnya tidak hanya mendesain struktur organisasi (*rule of game*) saja, tapi juga struktur komunikasi internal (*rule of representation*) atau aturan hak kepemilikan (*properti sign*). Karenanya kelembagaan harus mampu mendinamisir dirinya terhadap akselerasi perubahan. Karenanya perlu di *re-design* apakah kelembagaan yang telah terbangun masih akomodatif terhadap aspirasi yang berkembang. jika misal forum kemitraan tadinya hanya mengandalkan kesepakatan internal, mungkin ke depan akan diformalkan dengan akte notaris atau jika kelembagaan forum diperlukan perubahan dengan menjadi bentuk yayasan atau badan usaha (*trading house*), maka perlu persiapan design kelembagaan seperti yang dimaksud;
- b. *Pengembangan kelembagaan*. setelah *re-design* kelembagaan forum kemitraan yang disepakati, langkah selanjutnya adalah

mengimplementasikan gagasan tersebut dalam bentuk konkritnya. Intinya, design kemitraan KPEL dalam jangka panjang adalah sebuah lembaga yang memiliki kemampuan untuk mandiri dan independen, serta dirasakan manfaatnya oleh produsen, pemerintah daerah, maupun investor, sehingga memiliki alasan rasional untuk dikembangkan lebih besar (*eskalatif*) dan

c. *Mobilisasi sumber daya*. Kendati mobilisasi sumber daya telah sebelumnya, namun usaha ini tidak boleh berhenti, karena akan mengganggu fungsi eksistensi forum kemitraan dalam jangka panjang. (Sekretariat KPEL, 2002)

2.1.2.3. Kerangka Kelembagaan Program KPEL

Pengorganisasian program KPEL pada dasarnya terdiri dari lembaga kemitraan ditingkat pusat, Propinsi dan Kabupaten / Kota. Serta lembaga pendamping pusat, Propinsi dan Kabupaten / Kota. Setiap lembaga tersebut merupakan lembaga independent dan hanya memiliki hubungan koordinasi tanpa hubungan komando antar tingkatan (Pusat, Propinsi dan Kabupaten / Kota). Struktur lembaga yang dibangun melalui program KPEL dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Keterangan :

LJKN-PEL : Lembaga Jaringan Kemitraan Nasional Bagi Pengembangan Ekonomi Lokal

LJKP-PEL : Lembaga Jaringan Kemitraan Propinsi Bagi Pengembangan Ekonomi Lokal

LJKK-PEL : Lembaga Jaringan Kemitraan Kabupaten / Kota Bagi Pengembangan Ekonomi Lokal

NAPLED : *National Partnership for Local Economic Development*

PROPLED : *Propincial Partnership for Local Economic Development*

KPLED : Kabupaten / Kota *Partnership for Local Economic Development*

Pendampingan tingkat Kab. / : Yang seharusnya ada

Pendampingan tingkat : Bila Diperlukan

Lembaga kemitraan memegang peranan penting dalam menentukan jalannya kegiatan program KPEL. Lembaga Kemitraan yang terdiri dari unsur pemerintah, swasta dan masyarakat mengajak para pelaku kegiatan ekonomi dari suatu klaster komoditas untuk “duduk bersama” dalam menentukan langkah apa yang harus diambil untuk mengembangkan klaster komoditas tersebut dalam rangka meningkatkan pembangunan

ekonomi daerah. Lembaga kemitraan dalam program KPEL terdiri dari beberapa jenjang yaitu :

1. Kemitraan bagi pengembangan ekonomi lokal tingkat Kabupaten / Kota.

Kemitraan bagi pengembangan ekonomi lokal tingkat Kabupaten / Kota, atau KPLED adalah forum kemitraan pada tingkat Kabupaten yang beranggotakan wakil-wakil dari pihak swasta, masyarakat umum, pemerintah daerah (Dinas Instansi terkait). Perguruan tinggi, LSM, dan Kelompok produsen.

Kemitraan Bagi pengembangan ekonomi lokal tingkat Kabupaten / Kota berfungsi untuk merumuskan kebijakan-kebijakan atau rencana tindak bagi pengembangan klaster komoditas terpilih. Rencana tindak tersebut menekankan pada perencanaan, koordinasi, dan implementasi yang lebih spesifik dan berdampak langsung pada kelompok-kelompok sasaran. Seperti mendapatkan pembeli dari komoditas, pelatihan-pelatihan bagi pengusaha atau kelompok produsen yang menjadi sasaran target.

2. Kemitraan pengembangan ekonomi lokal tingkat propinsi.

Kemitraan bagi pengembangan ekonomi lokal tingkat propinsi atau PROPLED adalah forum kemitraan pada tingkat propinsi yang beranggotakan wakil-wakil dari sektor-sektor swasta masyarakat umum, pemerintah daerah (Dinas Instansi Terkait). Kelompok Produsen, LSM, Perguruan Tinggi dll.

Kemitraan bagi pengembangan ekonomi lokal tingkat propinsi atau PROPLED berfungsi untuk merumuskan kebijakan-kebijakan pada tingkat propinsi yang berhubungan dengan ekonomi lokal serta membuka atau mencari peluang pasar pada skala propinsi atau regional.

Tugas pokok dari lembaga kemitraan tingkat propinsi / regional ini adalah :

- 1. Menemukenali peluang pasar untuk mengembangkan komoditas terpilih**
- 2. Membuat rencana aksi dari klaster komoditas terpilih, mewujudkan tindakan untuk menangkap peluang, memfasilitasi kegiatan produksi dan pemasaran, meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.**
- 3. Mendorong swasta dan pemerintah untuk melaksanakan rencana tindak yang telah disusun pada tahun sebelumnya.**
- 4. Memobilisasi sumber daya manusia dan dana untuk emplementasi komponen rencana tindak.**
- 5. Mengatur/mengelola rencana tindak yang diimplementasikan, memonitor tingkat kemajuan pelaksanaan dan melakukan pelaksanaan bila diperlukan.**
- 6. Mengkoordinasikan aktifitas – aktifitas yang dilakukan oleh Forum kemitraan ditingkat Propinsi.**

Apabila di suatu Propinsi sudah terbentuk Forum Kemitraannya, demikian juga di Kabupaten / Kota dalam Propinsi tersebut juga terbentuk, maka hendaknya bisa berkolaborasi dan bekerjasama mulai dari proses perencanaan sampai kepada tingkatan emplementasi dalam mengembangkan klaster komoditas, sehingga dengan demikian diharapkan mampu mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan tujuan pokok dilaksanakannya program KPEL

3. Kemitraan bagi Pengembangan Ekonomi Lokal Tingkat Nasional

Kemitraan bagi Pengembangan Ekonomi Lokal tingkat Nasional atau NAPLED adalah Forum Kemitraan tibgkat Nasional yang merupakan perwakilan dari pemerintah. swasta, organisasi – organisasi kemitraan pada tingkat regional serta lembaga – lembaga lain yang tertarik pengembangan ekonomi lokal.

Kemitraan bagi Pengembangan Ekonomi Lokal tingkat Nasional atau NAPLED di tigtat pusat, berfungsi untuk merumuskan berbagai kebijakan atau rencana tindak yang berhubungan dengan pengembangan ekonomi lokal, serta mencari dan membuka peluang pasar baik yang berskala nasional maupun internasional.

2.1.2.4. Peran Pendampingan Dalam Program KPEL

2.1.2.4.1 Mengapa Perlu Pendampingan Dalam Program KPEL

Pendekatan KPEL diharapkan menjadi suatu program yang dikelola secara mandiri oleh daerah, dalam mengimplementasikan pendekatan KPEL di daerah diperlukan fungsi-fungsi perantara untuk membawa masyarakat sehingga mampu membangun dirinya sendiri maupun bersama-sama mitra baik dari sektor swasta maupun pemerintah.

Pada prinsipnya pendekatan yang digunakan dalam program KPEL, didesain agar pada saatnya nanti, daerah mampu menjaga alur, ritme dan kesinambungan program menuju kemandirian. Untuk itu diperlukan skema pendampingan sebagai sebuah strategi dalam pemberdayaan masyarakat daerah untuk membangun dan mengembangkannya kapasitasnya sesuai dengan kebutuhan, tuntutan dan perkembangan pembangunan yang ada.

Melalui pendampingan program KPEL yang dilakukan secara terstruktur dan dinamis, diharapkan masyarakat daerah akan mampu untuk: 1). Merumuskan persoalan pembangunannya dengan lebih fokus dan faktual, sebagai dasar untuk menentukan sikap dan tindakan yang tepat untuk menentukan masa depannya secara lebih baik. 2). Mengorganisir individu – individu menjadi kelompok terorganisasi, sehingga mampu mengakumulasi dan mengkapitalisasi potensi internal kelompok, serta memobilisir sumberdaya eksternal (SDM, SDA, Dana, Teknologi dll. dan 3). Menyelenggarakan pembangunan daerahnya yang berkeswadayaan secara efektif dan efisien.

Sebagai tindak dari skema pendampingan yang seperti ini, maka peran pendamping (fasilitator) dari program KPEL memiliki urgensi yang

strategis. melalui fungsionalisasi peran – peran fasilitator tersebut, maka desain implementasi program KPEL di Daerah akan lebih terarah, akseleratif dan menghasilkan keluaran yang berguna bagi penciptaan pra kondisi kemandirian perekonomian lokal.

Berdasarkan uraian diatas, maka pendampingan dalam program KPEL menjadi sangat penting karena :

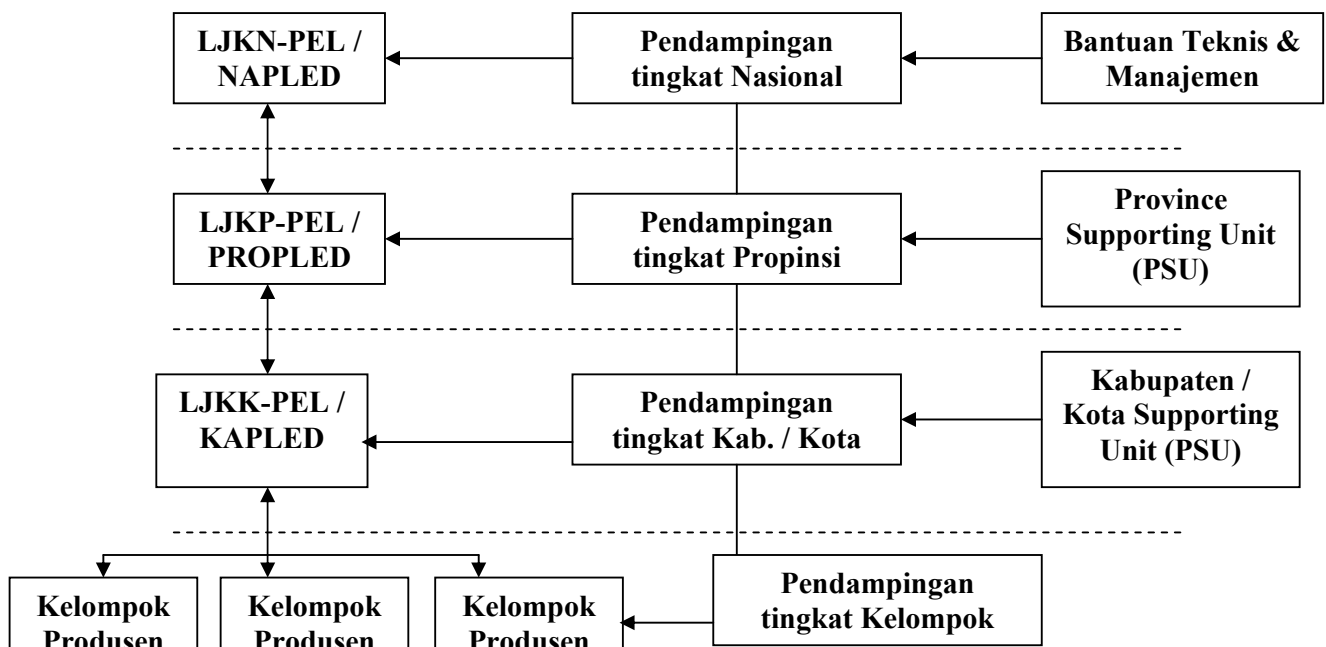
- a. KPEL menitik beratkan pada aspek pengembangan ekonomi daerah secara mandiri yang tentunya sejalan dengan otonomi daerah
- b. KPEL mengembangkan kemitraan yang berpotensi memberikan keuntungan bagi daerah
- c. KPEL memberikan advokasi pada perencanaan pembangunan yang berfokus pada kegiatan klaster komoditas ekonomi tertentu pada pemerintahan daerah.

2.1.2.4.2 Pendampingan Dalam Program KPEL

Fasilitator adalah profesi yang bertindak sebagai piranti pendukung suatu kegiatan atau program. Dalam program KPEL, fasilitator daerah terbagi menjadi 2 (dua). yaitu fasilitator ditingkat propinsi (Provinsial Suport Unit / PSU) dan fasilitator tiangkat Kabupaten / Kota (Kabupaten Suport Unit / KSU). karena rugas fasilitator melaksanakan fungsi sebagai perantara (intermediasi) atau menjembatani kepentingan antar sub kultur yang berbeda, maka seorang fasilitator (PSU dan KSU) sebaiknya memiliki kompetensi yang memadai, memiliki jaringan kerja yang luas, komitmen dan

memiliki integrasi pribadi yang dapat diterima berbagai kalangan (Stakeholders).

Meskipun demikian bukan berarti pendampingan dalam Program KPEL hanya dilakukan pada tingkat Kabupaten / Kota dan Propinsi saja. prinsip pembangunan partisipatif adalah mengikutsertakan kelompok masyarakat pada setiap level pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian ide, pelaksanaan di lapangan, sampai kepada monitoring dan evaluasi program. Namun demikian, yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam masyarakat sendiripun terdapat kesenjangan kemampuan untuk mendayagunakan diri sebagai unsur masyarakat madani. Karenanya, dalam beberapa tingkatan pembangunan, peran pendampingan masih sangat dibutuhkan sebagai piranti pendukung perkembangan suatu kegiatan. Pendampingan dalam program KPEL sebaiknya ada pada setiap level / tingkatan, mulai dari pendampingan ditingkat kelompok, pendampingan ditingkat Kabupaten / Kota, pendampingan ditingkat Propinsi dan pendampingan ditingkat pusat / nasional. berikut ini bagan pendampingan dalam program KPEL :



2.1.2.4.3 Tugas dan Fungsi Pendampingan Dalam Program KPEL

Pada setiap tingkat / level, pendamping memiliki tugas masing – masing. tugas dimaksud adalah :

- a. Pendamping pada tingkat kelompok mempunyai tugas memfasilitasi kelompok dalam menemukenali permasalahan yang dapat dibawa Lembaga Kemitraan untuk di pecahkan
- b. Pendamping pada tingkat Kabupaten / Kota, memiliki tugas untuk mendampingi dan memfasilitasi berbagai lembaga kemitraan ditingkat ini maupun kelompok ditingkat bawahnya (apabila tidak memiliki pendamping ditingkat kelompok), untuk mengembangkan klaster komoditas yang telah terpilih.
- c. Pendamping pada tingkat Propinsi memiliki tugas utama dalam mendampingi dan memfasilitasi berbagai kegiatan lembaga kemitraan ditingkat ini. serta untuk membangun jaringan baik modal maupun pasar komoditas yang lebih luas.
- d. Pendamping pada tingkat pusat / nasional, memiliki tugas utama dalam memfasilitasi berbagai kegiatan lembaga kemitraan ditingkat nasional untuk membangun jaringan kemitraan dari lembaga kemitraan pada berbagai tingkatan dan mengembangkan ekonomi lokal.

Disamping itu, pada dasarnya pendampingan disetiap tingkatan memiliki tugas pokok dan fungsi yang relatif hampir sama yaitu :

- Memfasilitasi pembentukan dan pematapan forum kemitraan sesuai dengan prinsip – prinsip KPEL

- **Dibawah koordinasi dari sekretariat pusat ataupun forum kemitraan diwilayahnya, menjamin konsistensi pelaksanaan konsep dan model keterkaitan wilayah.**
- **Menyediakan bantuyuan teknis bagi forum kemitraan diwilayahnya agar lembaga kemitraan tersebut dapat berkembang serta melaksanakan rencana tindak yang telah dihasilkan oleh lembaga kemitraan tersebut.**
- **Membantu forum kemitraan daerah dalam mendiseminasikan ber berbagai kegiatan yang tercakup dalam rencana tindak**
- **Memobilisasi sumber daya yang diperlukan bagi pelaksanaan rencana tindak.**
- **Berkoordinasi dengan berbagai *stakeholder* terlibat dalam program KPEL.**
- **Memonitor berbagai kegiatan yang dilakukan oleh forum kemitraan, serta pelaksanaan rencana tindak untuk menjamin bahwa kemajuan telah dicapai sesuai dengan rencana dan mengerti inisiatif apa dimasa depan**

Dalam mnjaga kesadaran terhadap program didaerah, maka dapat dimulai dengan membangun pengetahuan dasar dari para pendamping tentang program ini. Dari sini baru dapat dibangun kesadaran daerah terhadap program. berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pendamping untuk membangun kesadaran terhadap program didaerah yaitu :

- ◆ pendamping perlu untuk menggali lebih dalam tentang KPEL melalui lokakarya, studi banding, atau mengundang nara sumber untuk berdialog
- ◆ Memfasilitasi pelaporan kembali pada para stakeholder yang lebih luas baik yang berada secara internal didalam pemerintahan daerah maupun yang berada di luar pemerintah daerah.
- ◆ Mendiseminasikan berbagai materi yang pernah didapat pada para stakeholder disaat melakukan pelaporan kembali.
- ◆ Jika memungkinkan mengirim perwakilan untuk mengadakan studi banding.
- ◆ Menginisiasi pertemuan, curah pendapat dengan seluruh stakeholder dan mengundang narasumber dari pusat
- ◆ Menyusun tugas tim untuk menginisiasi KPEL.

2.1.2.4.4 Memilih Pendamping dalam Program KPEL

Langkah yang dapat dilakukan untuk mendapatkan pendamping dalam mendukung program KPEL dibutuhkan :

- ☞ Mengidentifikasi calon personel pendamping. Para pendamping ini dapat berasal dari berbagai unsur seperti aparat pemerintah, organisasi kemasyarakatan, akademisi, lembaga penelitian, ataupun individu yang memiliki perhatian besar terhadap program KPEL.
- ☞ Menyeleksi calon pendamping. Dalam proses ini calon pendamping diutamakan dapat memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh

daerah. Oleh karenanya penting menyusun kriteria yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pendamping dalam program KPEL. Kriteria tersebut meliputi :Umur, pendidikan, domisili, pengalaman pendamping, jaringan yang dimiliki, kemampuan teknis, penguasaan teknologi, motivasi dan kesibukan dari calon pendamping yang hendak dipilih.

☞ Melatih calon pendamping. pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman, kemampuan dan kapasitas pendamping dalam memfasilitasi program KPEL di daerah.

☞ Mobilisasi sumberdaya. Salah satu sumberdaya yang dibutuhkan dalam program ini adalah pendanaan kegiatan. Dengan begitu pendampingan yang ideal seharusnya adalah yang dapat melaksanakan tugasnya sebagai bagian dari tanggungjawabnya. Atau orang yang mau bekerja secara sukarela, atau juga orang yang memiliki pendanaan sendiri. Untuk dapat mendanai operasional pendampingan ini terdapat beberapa sumber yang dapat digunakan yaitu :

- Menutup biaya operasional dengan pendanaan yang ada dalam program KPEL bagi para pendamping
- Mengalokasikan dana dari pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk program KPEL
- Dana hibah khusus dari kepala daerah

- Mengidentifikasi calon-calon donor yang mau membiayai operasional pendamping .(*Sekretariat KPEL, 2003*)

2.1.3. Konsep Persuteraan Alam

Persuteraan alam adalah merupakan kegiatan yang dapat dikategorikan dalam bentuk agroindustri. Kegiatan ini mencakup beberapa aktifitas lain dan merupakan rangkaian kegiatan yang saling membutuhkan. Rangkaian kegiatan dimaksud meliputi : penanaman murbei, pembibitan ulat sutera, pemeliharaan ulat sutera, panen kokon, dan pemintalan benang sutera. Kegiatan selanjutnya adalah pembuatan tenun sutera dan pemasarannya. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dikelola secara *home industry*, baik sebagai usaha pokok maupun sampingan. Serta dapat memanfaatkan tenaga yang ada dalam keluarga. (*Dirjen RPLS, 2000*).

Ulat sutera yang dikenal oleh peradaban dunia sejak 2600 SM, kini masih tetap diperdagangkan sebagai serat eksklusif, walaupun merupakan bagian yang kecil (0,17%) dari kebutuhan dunia akan serat tekstil. Namun diharapkan kebutuhan sutera alam dunia pada tahun 2010 akan mencapai 85.000 ton, atau naik 1000 ton per tahun dalam dasawarsa 90-an (*Dirjen RRL, 1997*)

Agroindustri persuteraan alam memiliki rangkaian kegiatan yang panjang. Kegiatan-kegiatan yang terdiri dari kegiatan *Moriculture*, *Sericulture*, *Filaculture* dan *Manufacture*. Kegiatan *Moriculture* adalah budidaya tanaman murbei sebagai bahan pakan ulat sutera. Sasaran dari

kegiatan ini adalah menghasilkan daun murbei dengan nutrisi paling baik bagi ulat sutera dan dapat mendukung kegiatan ekonomi para petaninya. Kegiatan *Sericulture* meliputi penyediaan bibit ulat sutera/telur dan kegiatan untuk menghasilkan kokon. Sasaran kegiatan ini adalah memproduksi telur kupu-kupu sebagai bibit unggul ulat sutera. Dalam hal ini Perhutani bertindak sebagai produsen dan distribusi telur ulat sutera kepada petani. Di Indonesia hanya terdapat dua tempat pembibitan ulat sutera, yakni di Bilibili (Sulawesi Selatan) yang diperuntukkan masyarakat Indonesia bagian timur, dan di Desa Candiroti Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah yang diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia bagian barat. Kegiatan *sericulture* ini bersifat insentif tenaga kerja dan waktu.

Kokon yang dihasilkan di Indonesia memiliki panjang felamen maksimum 1000 m ini untuk kualitas sedang. Sedangkan untuk kualitas baik biasanya sampai mencapai panjang felamen 1.400 sampai dengan 1.500 m (*Dirjen RRL, 1997*).

Kegiatan *Filature* meliputi proses pengolahan (*reeling*) kokon sampai menjadi benang sutera, dan produk turunannya dalam rangka meningkatkan kualitas benang sutera sebagai bahan kain sutera. Untuk menghasilkan 1 kg benang sutera diperlukan 7 kg kokon dan akan menghasilkan 10 m kain sutera. (*Dirjen RRL, 1997*). Sedangkan kegiatan *Manufacture* meliputi pembuatan benang sutera dengan mutu yang lebih baik melalui *doubling*, *twisting*, *degumming*, pewarnaan benang, pengembangan desain dan penenunan sutera.

2.1.4 Sejarah Persuteraan Alam

Pada masa Dinasti Han (2500 SM), sudah dikenal dengan adanya usaha budidaya ulat sutera, pada saat itu pula sudah ada usaha pemintalan benang sutera. Pada waktu itu mulai diciptakan alat – alat pengolah kokon sutera menjadi benang sutera dan tenunnya menjadi kain sutera yang sangat halus, dan diberi nama “Serica” yang berarti “Sutera”.

Budidaya ulat sutera, yang mula – mula hanya berkembang terbatas di dalam negeri saja, namun kemudian disusul dengan berkembangnya perdagangan ke negara – negara tetangga dan negara – negara lain. Hasil dari budidaya ulat sutera yang berupa kain sutera menjadi dagangan yang cukup menarik bagi para pedagang. Jaringan perdagangan sutera dan perdagangan lain pada umumnya mampu memasuki negara-negara Eropa lewat Jalur Karavan, dulu dikenal dengan “*Silk Road*”. *The Silk Road* atau “Jalur Sutera” adalah jalur perdagangan yang paling terkenal di peradaban Cina. Atas prakarsa dari seorang pedagang yang bernama Chan Chein. Perdagangan ini tumbuh di masa Dinasti Han. Jalur perdagangan sutera ini berkembang pesat, diawali dengan diberinya hadiah bahan sutera kepada Kaisar di Roma oleh Cia. Jalur ini berkembang dari Cina – Asia Tenggara – Hindia Utara - Partian – Roma, sepanjang 7.000 mil. Selanjutnya menyambung ke Yellow River Valley dan ke Laut Mediteranean dan melewati kota-kota di Cina. Seperti Kansu dan Sinkiang, yang sekarang dikenal dengan Iran, Irak dan Suriah.

Pedagang di India dan Barat India merupakan perantara perdagangan sutera antara Cina dengan negara – negara Mediteranaen. Pada Dinasti Tang, kurang lebih tahun 706 SM, perdagangan sutera menurun dan berkembang lagi pada masa Dinasti Sung di abad 11 dan 12. baru pada tahun kurang lebih 300 M. negara – negara lain seperti Korea, India dan Jepang berhasil mengetahui rahasia pengolahan sutera dan mulai untuk mengembangkan sendiri persuteraan alam, termasuk di dalamnya budidaya ulat sutera di negaranya masing – masing, serta berusaha megembangkan bahan – bahan lokal yang ditemukannya.

Sejak abad ke-2, Jepang mulai mendatangkan kupu – kupu penghasil sutera dari Cina. Usaha persuteraan alam ini berkembang dengan pesat, sehingga kemudian dapat menjadi salah satu pokok perekonomian Jepang. Usaha ini mengalami kejayaan pada jaman Meiji, kurang lebih 1889 M, pada saat itu dapat dihasilkan kurang lebih 200 ton, dan pada abad 18 – 19 dapat mengekspor sutera mentah sebesar kurang lebih 40.000 ton.

Dari perkembangan perdaganyan sutera ke barat (Eropa) dan Timur Tengah, maka pusat perdagangan sutera bagi negara – negara barat berada di Kota Venesia (Italia), sedangkan untuk Timur Tengah di Bagdad dan Damaskus, selanjutnya perdagangan sutera dilakukan lewat laut, sehingga sutera dapat mencapai Perancis, Inggris, Spanyol dan Jerman. Dari negara – negara barat, Perancis sejak abad ke-13 mulai mengusahakan kain sutera, yang berpusat di Lyon. Sedangkan di Inggris pada abad ke-15 telah didirikan pabrik tenun yang pertama.

Pada abad 14 Raja Perancis telah mendapatkan bibit ulat sutera dari Milan (Italia) dan mulai mengembangkannya di sekitar lembah Rhine. Sedangkan baru pada abad 17 seorang Inggris yang bernama Thomas Lombe, mendirikan pabrik sutera di Derby, dengan mesin dari Italia. Pada abad 16 Perancis dan Italia mulai membudidayakan ulat sutera sendiri untuk memenuhi kebutuhan akan benang sutera yang makin lama makin meningkat. Hanya sampai tahun 1854 persuteraan alam di Eropa berkembang lancar. Sejak adanya wabah penyakit yang menghancurkan pemeliharaan ulat sutera dan mengakibatkan merosotnya industri sutera, akhirnya negara – negara Eropa hanya bisa bergerak berdasarkan impor bibit dari Asia. Dengan demikian, maka sejak itu Cina tidak lagi memonopoli persuteraan alam dengan teknologi tinggi. Dan saat itu pula persuteraan alam atau budidaya ulat sutera mulai dikenal di banyak negara di Asia, Eropa dan Timur Tengah. (*H. Soekirman Atmosoedarjo, dkk. 2000*)

2.1.5 Perkembangan Persuteraan Alam di Indonesia

Perkembangan sutera alam di Indonesia sebenarnya sudah di kenal sejak abad 10, yakni sejak kerajaan – kerajaan di Indonesia mengadakan hubungan dagang dengan Cina dan India, terutama bahan pakaian untuk kerabat kerajaan. Berdasarkan data pada masa Dinasti Sung (Cina), benang sutera telah ditemukan di nusantara, tepatnya pada abad ke-9. Dari sumber-sumber Jepang karya Osyou yang diterjemahkan oleh Lion Rusny (1868) disebutkan adanya terminologi persuteraan alam dalam tiga bahasa (Melayu, Jawa dan Bugis). Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan

industri sutera alam (sektor hilir) terlebih dahulu dikenal di Nusantara (Sulawesi) dari pada budidaya ulat sutera (sektor hulu).

Pada zaman Kolonial Belanda, kegiatan budidaya ulat sutera pertama kali dilakukan oleh Zwaardcroon (1718 – 1725 M) dan dilanjutkan oleh Den Haan (1725 – 1729). Tercatat bahwa pada periode itu telah berhasil diproduksi benang sutera sebanyak 34,5 pound dan di tahun 1735 telah diekspor ke Kerajaan Belanda sebanyak 300 pound. Natalis Rondot dalam perjalanannya ke Nusantara di tahun 1735 mencatat bahwa telah dihasilkan sekitar 30 bale benang sutera dan telah diekspor ke Amsterdam dengan harga kurang lebih sama dengan harga sutera Italia. Proyek persuteraan alam Zwaardcroon dan De Haan mengalami kebangkrutan karena kegagalan budidaya ulat sutera yang disebabkan oleh faktor zooteknik dan agroklimat

Usaha – usaha budidaya ulat sutera atau persuteraan alam di era Kolonial dilanjutkan di tahun 1833 oleh Gubernur L. M. Rollin Conquerque dengan mendatangkan ahli – ahli budidaya ulat sutera dari Eropa ke Indonesia dan membawa serta bibit (telur) dari Lyon (Perancis). Usaha yang dilakukan antara lain membuat demonstrasi plot (Demplot) di Priangan (sekitar Bandung). Usaha tersebut tidak mendapat respon masyarakat karena dilakukan secara paksa. Usaha ini juga gagal karena bibit ulat sutera Monovoltin Eropa sulit beradaptasi di daerah baru. Dari catatan ekspdisi Isidore Hedde di Nusantara tahun 1845 bahwa ulat sutera merupakan salah satu komoditas Cultur Stelsel.

Lei Kim Liong adalah pioneer, peletak dasar budidaya ulat sutera modern di Hindia Belanda. Lei Kim Liong berbudidaya ulat sutera ras Tropical Bivoltin Cina – Jepang, yang mempunyai aklimatisasi sangat baik di daerah – daerah tropik basah seperti Indonesia. Atas keberhasilan tersebut Pemerintah Kolonial Belanda menggalakkan kembali proyek budidaya ulat sutera atau persuteraan alam 1918.

Pada waktu yang sama Jepang berhasil mengembangkan budidaya ulat sutera di Garut (Jawa Barat), Curup (Bengkulu), Siantar (Sumatra Utara) dan di sekitar Solo (Jawa Tengah) di daerah – daerah dengan ketinggian antar 1000 – 5000 kaki. Selama periode pendudukan Jepang kondisi serikultur di Indonesia di ubah. Pemerintah Jepang melatih pemuda – pemuda Indonesia untuk berbudidaya ulat sutera, terutama di Cimalaka (Sumedang) dan Wanareja (Garut). Jenis ulat sutera yang dipelihara adalah *Bombyx mori*, ulat sutera jenis ini bahan pakannya adalah daun murbei dan *Philosamia ricini* yang bahan pakannya adalah daun jarak.

Pada tahun 1950, Bapak Soejarwa, mantan Menteri Kehutanan RI bersama dengan Kepala Dinas Kehutanan Yogyakarta menjalankan Program Pemanfaatan Lahan Kehutanan yang dikenal dengan “ *Multiple Use Of Forest Lands*” dengan mengembangkan budidaya ulat sutera / persuteraan alam dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Budidaya ulat sutera kemudian dipindah ke Cisarua pada tahun 1954 dan ditenakkan oleh Naito dan Kosasih bari Bandung sampai dengan tahun

1961. Pada tahun 1961 Ackub dari Sukabumi dan Machdar dari Garut bergabung. Pada tahun yang sama terbentuk organisasi sutera alam Indonesia pertama yang diberi nama Industri Sutera Rakyat Indonesia yang disingkat ISRI.

Pada tahun 1962, kegiatan budidaya ulat sutera masuk ke Sulawesi Selatan melalui para pedagang benang sutera untuk dibuat sarung bugis dan disebarluaskan kepada masyarakat. Pada tahun 1963 dibentuk Balai Sutera yang bertempat di Lembang Jawa Barat, dibawah naungan Direktorat Jenderal Kehutanan, Departemen Pertanian. Pada saat yang sama, Departemen Veteran dan Demobilisasi mendirikan pabrik pemintalan benang sutera di Ciawi Jawa Barat dengan maksud menciptakan lapangan kerja bagi para veteran. Tahun 1966 pemerintah mendirikan pabrik pemintalan benang sutera di Yogyakarta dengan mengandalkan bahan baku dari masyarakat. Tahun 1967 pemintalan di Yogyakarta dan Ciawi mulai tersendat – sendat dan akhirnya terhenti akibat kurangnya supply bahan baku.

Pada tahun 1968 Departemen pertanian memberikan wewenang kepada Direktorat Jenderal Kehutanan untuk mengelola persuteraan alam melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 26/2/68 tanggal 19 Februari 1968. Sejak tahun 1970 pemerintah telah mengadakan pembinaan terhadap petani budidaya ulat sutera, melalui pembangunan proyek persuteraan alam Sulawesi Selatan. Pada tahun 1976 ada Bantuan Presiden (BANPRES) berupa pemintalan semi otomatis untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Dan

Sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 1985 melalui Direktorat Jenderal Kehutanan mengadakan kerjasama teknik dengan pemerintah Jepang yang dituangkan dalam bentuk Proyek Kerjasama ATA – 72 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 146/Kpts-V/1968 tanggal 12 Mei 1968, dibentuk Badan Pembinaan Persuteraan Alam Nasional yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 702/Kpts – II/1989 tanggal 17 November 1989 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. 100/Kpts – II/1994 tanggal 5 Mei 1994.

Pada tahun 1992 dibentuk Masyarakat Persuteraan Alam Indoneisa (MPAI). MPAI ini beranggotakan unsur – unsur dari swasta dan para peminat budidaya ulat sutera, yang bergerak dalam bidang persuteraan alam. Pada tahun yang sama PT Jado Wanasutera yang sekarang menjadi PT Indo Jado Sutera Pratama mulai mendirikan pemintalan benang sutera dengan alat otomatis.

Pada tahun 1996 dirintis pemberian Kredit Usaha Tani (KUT) Persuteraan Alam kepada petani / kelompok tani budidaya ulat sutera, melalui program “*Mitra Usaha*”. Pada tahun yang sama dilakukan kerjasama dengan pemerintah Romania dalam bidang Breending ulat sutera. (H.Soekirman Atmosoedarjo,dkk. 2000)

2.1.6 Budidaya Tanaman Murbei

Tanaman murbei merupakan pakan bagi ulat sutera. Tanaman murbei termasuk ke dalam famili *Moroceae* terdiri dari banyak jenis tetapi

yang umum di kembangkan di Indonesia ada empat jenis yaitu *Morus Alba*, *M. Cathayana*, *M. Multicaulis* dan *M. Nigra*. Tanaman murbei dapat tumbuh baik jika aerasi dan drainase tanahnya baik, solum minimal 50 cm, unsur hara tercukupi, tanah tidak asam (pH optimal 6,5) dan kelembaban udara cukup menunjang yaitu sekitar 65 - 85%. Tanaman murbei dapat tumbuh di daerah dataran rendah dan dataran tinggi. Tanaman murbei membutuhkan curah hujan 635 - 2.500 mm per tahun. Suhu optimal untuk pertumbuhan murbei antara 23,9° C dan 26,6° C, tetapi umumnya tanaman murbei dapat tumbuh baik dengan suhu minimum 13⁰ C dan suhu maksimum 38° C.

Perbanyakan tanaman murbei dapat dilakukan secara generatif (dengan biji) dan vegetatif (stek, layering dan grafting). Perbanyakan dengan stek adalah yang paling banyak dipakai karena praktis dan ekonomis.

Setelah tanaman tumbuh dilakukannya pemeliharaan tanaman yang terdiri dari :

a. Penyiangan

Dilakukan dengan menghilangkan tanaman pengganggu untuk mencegah persaingan dengan tanaman murbei.

b. Pendangiran

Dilakukan dengan menggemburkan tanah di sekitar tanaman murbei, dilakukan setiap tiga bulan.

c. Pemupukan

bervariasi tergantung dari jenis, sistem penanaman dan jarak tanam.

Waktu pemberian pupuk setelah pangkas pada awal atau pertengahan musim hujan.

d. Pengendalian hama dan penyakit.

Hama pemakan daun murbey sebagai makanan pokok ulat sutera sampai saat ini belum ditemukan obatnya. namun demikian pengendalian hama dan penyakit selalu terus diupayakan petani dengan berbagai macam cara, seperti disemprot dengan buah jambe yang digepuk atau ditumbuk terlebih dahulu, setelah itu dicampur dengan air baru disemprotkan.

e. Pemangkasan.

1. Pemangkasan pembentukan batang

Dilakukan pada tanaman yang sudah berumur 9 – 12 bulan, setelah tanam dengan memotong cabang miring ke atas 45°. Pemangkasan ini bertujuan untuk membentuk batang pokok tanaman murbei.

2. Pemangkasan pemeliharaan

Dilakukan secara periodik setelah pangkasan pembentukan batang, bertujuan memelihara pohon murbei dengan memangkas cabang yang terserang penyakit dan cabang-cabang yang tidak produktif. *(Peter Reger, 2003)*

Panen daun sebaiknya dilakukan pada pagi hari atau sore hari untuk mencegah kelayuan. Ulat kecil membutuhkan daun yang lunak, yaitu daun muda (umur pangkas satu bulan). penyediaan daun untuk ulat kecil dapat diperoleh dengan dua cara :

- a. Daun dari umur pangkas satu bulan (kebun khusus)
- b. Daun muda pada umur pangkas 2 – 3 bulan (3 lembar daun dari ujung atas) khusus untuk *Morus nigra* dan *Morus cathayana*.

Jumlah daun yang dibutuhkan untuk ulat besar lebih banyak dari pada kebutuhan ulat kecil. Daun untuk ulat besar dapat diperoleh pada umur pangkas 2 – 3 bulan dengan cara memotong cabang pada batas daun yang terbawah (masih hijau dan segar).

penyimpanan daun untuk ulat kecil dan ulat besar dilakukan pada ruangan khusus untuk penyimpanan, yang biasanya terdapat pada bangunan pemeliharaan ulat. Penyimpanan tersebut bertujuan agar kebersihan dan kesegaran daun murbei yang merupakan pakan ulat tetap terjaga, karena kebersihan dan kualitas daun murbei sangat berpengaruh terhadap kualitas kokon yang dihasilkan oleh ulat.

2.1.7 Budidaya Ulat Sutera

Ulat sutera termasuk larva serangga/insekta yang disebut juga Hexapoda merupakan kelas terbesar dari Phylum Arthropoda. Klasifikasi lengkap adalah sebagai berikut :

Phylum : Arthropoda
Kelas : Hexapoda

Sub Kelas	:	Pterygota
Divisi	:	Endopterygota
Ordo	:	Lepidoptera
Famili	:	Bombycoidea
Genus	:	<i>Bombyx</i>
Species	:	<i>Bombyx mori Linn</i>

Ulat sutera merupakan hexapoda yang berguna sebagai penghasil benang sutera. Dalam siklus hidupnya melalui metamorfosa sempurna (*Holometabola*), yaitu selama siklus hidupnya melalui empat stadium yang berbeda : telur, larva, pupa dan kupu-kupu.

Telur ulat sutera berbentuk bulat lonjong dengan berat sekitar 1 gr. panjang telur 1 – 1,3 mm, lebar 0,9 – 1,2 mm dan tebal 0,5 mm dengan warna putih-putih kekuningan. telur biasanya menetas 10 hari setelah perlakuan khusus, pada suhu 25° C dan kelembaban udara 80 – 85 %. Ulat sutera terbagi lima instar, yaitu:

- a. Instar 1,2 dan 3 disebut ulat kecil dengan umur sekitar 12 hari.
- b. Instar 4 dan 5 disebut ulat besar dengan umur 13 hari

Tempat untuk pemeliharaan ulat kecil harus bersih, suhu ruangan 26 ° - 28° C, kelembaban udara 80 – 90% dengan cahaya dan sirkulasi udara cukup. Pakan untuk ulat sutera adalah daun murbei. Untuk ulat kecil daun yang baik berumur pangkasan 25 – 30 hari dengan waktu pengambilan pagi atau sore hari. Cara pengambilan daun untuk tiap instar pada ulat kecil berbeda. untuk instar 1 lembar 3 – 5 dari pucuk, untuk instar 2 lembar 5 – 7 dari pucuk, dan instar 3 8 – 12 dari pucuk.

untuk menjaga supaya ulat kecil tidak terkontaminasi bakteri/penyakit maka dilakukan desinfeksi tubuh ulat dengan menggunakan campuran kaporit dengan kapur yang ditaburkan tipis dan merata pada tubuh ulat dengan saringan, sebelum *hakitake* (pemberian makan pertama pada ulat yang baru menetas) pada awal instar 2 dan awal instar 3. Dalam pemberian pakan, daun yang diberikan harus daun yang baik, tidak basah, segar dan bersih. Setelah *hakitake* selanjutnya ulat kecil diberi makan sehari tiga kali. Bila sisa makan sudah banyak, dilakukan pembersihan tempat ulat sebelum pemberian pakan, kecuali selama instar 1 tempat ulat tidak perlu dibersihkan karena kotoran ulat masih sedikit. Jika terdapat ulat yang sakit dan mati dimasukkan ke dalam tempat tertutup berisi bahan desinfektan. Bila pemeliharaan ulat besar dilakukan di tempat lain maka penyaluran ulat dilakukan pada sore hari pada saat tidur instar 3, sehingga ulat tidak mengalami gangguan yang berarti yang akan mengganggu kondisi fisiknya.

Sebelum pemeliharaan ulat besar, ruangan harus didesinfektan dengan larutan kaporit yang disemprotkan secara merata ke seluruh ruangan. Bangunan untuk pemeliharaan ulat besar terdiri dari ruangan tempat daun dan tempat pemeliharaan. Suhu ruangan 22° - 25° C, kelembaban 70 – 75% dengan cahaya dan aliran udara baik. Pakan untuk ulat besar adalah daun berumur pangkas 2,5 – 3 bulan. Pengambilan daun dilakukan pagi dan sore hari. Daun pakan yang diberikan harus baik, tidak basah, segar dan bersih. Daun diberikan sehari tiga kali, yakni pukul 07.00 sebanyak 25%, pukul 12.00 sebanyak 25% dan pukul 17.00 sebanyak 50%. Cabang daun

diletakkan berjajar, pangkal cabang diletakkan berlapis putar balik. Tempat ulat dibersihkan terlebih dulu sebelum pemberian makan. Selain itu juga pada instar 4 pembersihan tempat ulat dilakukan setelah ganti kulit, pertengahan instar dan menjelang ulat tidur. Pada instar 5 pembersihan tempat ulat setelah ulat ganti kulit setiap sua hari atau kotoran sudah terlalu banyak dan yang terakhir menjelang ulat mengkokon.

Seperti pada ulat kecil, pada ulat besar juga dilakukan desinfeksi tubuh ulat dengan menggunakan campuran kapur dan kaporit yang ditaburkan tipis dan merata pada tubuh ulat dengan menggunakan saringan atau kain kasa. Desinfeksi ini dilakukan sebelum pemberian makan./ Setelah instar 5 ulat memasuki tahap pengkokonan. Ulat sutera umumnya membuat kokon selama 2 – 3 hari. tanda-tanda ulat akan membuatn kokon adalah sebagai berikut:

1. Pada taraf instar 5, pembuatan kokon pada hari ke-7 dan ke-8.
2. Nafsu makan berkurang dan akhirnya berhenti makan.
3. Tubuh ulat menjadi tembus cahaya dan mengkerut.
4. Mulut ulat mengeluarkan serat sutera dan pada duburnya mengeluarkan cairan berwarna kuning.

Pelaksanaan pengambilan kokon dapat dimulai 5 – 6 hari dari mulainya ulat pertama mengkokon. Pemanenan kokon sebaiknya dilakukan tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Kalau terlau cepat, pupa mudah pecah yang mengakibatkan kokon kotor di dalam, sedangkan kalau terlalu lambat pupa akan segera berubah menjadi kupu-kupu. Pada waktu panen,

kokon segera dibersihkan dari "floss"-nya. Kemudian diadakan seleksi kokon yaitu kokon yang baik dipisahkan dari kokon yang tidak baik. Kokon disimpan pada tempat yang baik, aman dari gangguan hama seperti semut, tikus dan sebagainya. Setelah seluruh kokon dipanen, semua peralatan yang digunakan untuk pemeliharaan ulat besar dibersihkan dan dapat dipersiapkan untuk pemeliharaan ulat berikutnya. (Peter Reger,2003)

2.2 Penelitian Terdahulu

Piet Budiono, (2005) Mengadakan penelitian dengan judul Pendampingan Perempuan Pedang Pasar Tradisional Melalui Kredit Mikro. penelitian yang dilakukan Pit Budiono ini bertujuan ingin mengetahui tingkat perbedaan perempuan pedagang pasar tradisional sebelum dan sesudah mendapatkan kredit dari Koperasi BAGOR untuk modal kerja. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : program pendampingan bermakna secara statistik meningkatkan kesejahteraan keluarga, meningkatkan keuntungan usaha, dan meningkatkan kepercayaan diri perempuan pedagang pasar tradisional.

Sesuai dengan hasil penelitian, maka terjadi perbedaan yang positif bagi perempuan pedagang pasar tradisional antara sebelum mendapatkan pendampingan dari Koperasi BAGOR dengan sesudah mendapatkan pendampingan.

Ni Made Santhi Parmini, (2003) Mengadakan penelitian tentang Pengaruh Kredit Usaha Tani dari Koperasi Serba Usaha (KSU) Utama,

terhadap pendapatan petani sayur di Desa batunya Kecamatan baturiti Kabupaten tabanan Propinsi Bali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kredit yang diberikan oleh KSU Utama terhadap pendapatan petani sayur didaerah penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Jumlah kredit dari KSU Utama berpengaruh positif terhadap tingkat pendapatan petani sayur di Desa batunya Kecamatan baturiti Kabupaten tabanan Propinsi Bali.

Prawerti (1995), menganalisis kegiatan agroindustri sutera alam di PT. Indo Jado Sutera Pratama, yang berlokasi di Sukabumi, Jawa Barat. Dari analisis tingkat pendapat petani menunjukkan rata-rata pendapatan usaha tani budidaya ulat sutera atau persuteraan alam yang diterima petani besar (lahan \geq 1 hektar) sebesar Rp.1.079.196,00 per tahun, sedangkan bagi petani kecil dengan (lahan \leq 1 hektar) sebesar Rp. 451.189,10 per tahun. Kontribusi usaha tani budidaya ulat sutera terhadap pendapatan keluarga untuk petani besar 29,70%, dan untuk petani kecil sebesar 19,10%. Penelitian ini juga memaparkan nilai tambah yang dihasilkan per bulan yaitu 2.080,00 per kg bahan baku atau 8,73% dari nilai produknya. Besarnya bagian tak langsung dari kapasitas tersebut sebesar 77,85% terhadap nilai tambah, sedangkan tingkat keuntungan sebesar 1,93% dari nilai produknya.

Tim Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat ITB dalam Prawerti (1995) mengadakan studi skala ekonomi usaha industri kecil pemintalan sutera. Disini usaha persuteraan alam atau budidaya ulat sutera dibagi atau dikelompokkan menjadi tiga golongan. 1). Meliputi produksi daun murbei

dan produksi kokon. 2). Mengolah kokon untuk menghasilkan benang sutera mentah, tanpa penanaman murbei dan pemeliharaan ulat sutera. Dan 3). Kegiatan yang lengkap secara vertical dari produksi daun murbei sampai *degumming* dan pengepakan benang sutera mentah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk ketiga skala usaha, kegiatan budidaya ulat sutera atau persuteraan alam memiliki prospek untuk mendapatkan laba cukup baik. Semakin baik dan integrasi vertikal skala usaha yang dilakukan, maka laba yang didapat semakin besar.

Penelitian yang mengkaji berbagai tipe pola usaha persuteraan alam dan hubungannya dengan pendapatan usaha tani dilakukan oleh *Budi Santoso dalam Sihite (1991)*. 1). Pola usaha yang diteliti terdiri dari pola usaha ulat sutera kecil dan ulat sutera besar (*Moriculture dan Sericulture*). 2). Pola usaha ulat kecil sampai ulat besar dan pemintalan benang (*Moriculture sampai Filature*) dan 3). Pola usaha murbei dan ulat besar tanpa memelihara ulat kecil dan pola usaha murbei dan ulat besar dan pemintalan benang tanpa memelihara ulat kecil.

Dari beberapa pola usaha ini, tampak bahwa ada tipe pola usaha yang tidak melakukan pemeliharaan ulat kecil. Hal ini disebabkan relatif sulitnya pemeliharaan ulat kecil yang sangat membutuhkan sarana, perhatian dan perlakuan khusus secara intensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola usaha yang lebih banyak kegiatan usahanya atau lebih panjang dan lengkap rantai usahanya, menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Ini berarti semakin panjang dan terpadu rantai kegiatan usaha budidaya ulat sutera /

sutera alam yang dilakukan, akan memberikan pendapatan yang semakin besar meskipun resiko kegagalan usahanya juga besar.

Sihite (1991) melakukan penelitian tentang kelayakan investasi perusahaan kokon dilihat dari segi finansial dan manfaat sosialnya pada suatu skala usaha yang besar (perusahaan) di PT. Ackub Wana Sutera. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa investasi perusahaan kokon yang dilakukan dalam skala perusahaan memiliki kelayakan secara finansial pada tingkat suku bunga 12% dan 15%. Ini ditunjukkan pada NPV yang positif, B/C Ratio yang lebih besar dari satu dan IRR yang lebih besar dari tingkat suku bunga yang berlaku. Disamping itu, investasi perusahaan kokon ini memiliki dampak sosial yang cukup luas, terutama dari aspek penciptaan lapangan kerja (*Employment*). Hal ini dimungkinkan karena karakteristik dari perusahaan kokon yang padat tenaga kerja, baik dari budidaya tanaman murbei maupun bidang serikulturnya.

Bachtiar (1991) membandingkan usaha tani sutera alam di Garut, Jawa Barat dan di Sopeng, Sulawesi Selatan melalui analisa ekonomi. Hasil analisis menunjukkan bahwa efisiensi dan keragaan ekonomi usaha tani kokon dan industri pemintalan benang sutera di Kabupaten Garut lebih baik dibandingkan dengan usaha sejenis di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Usaha tani kokon dan industri benang sutera di Kabupaten Garut lebih intensif modal, dan pengembangannya cenderung mengarah pada intensifikasi. Sementara usaha tani kokon dan industri pemintalan benang sutera alam di Kabupaten Sopeng lebih intensif tenaga kerja, dan

pengembangannya cenderung mengarah ke ekstensifikasi. Hal ini disebabkan oleh relatif lebih baiknya peralatan usaha terutama di bidang pemintalan benang sutera di Garut, Jawa Barat, serta pengetahuan tentang sutera alam yang lebih baik dan maju. Sementara peralatan usaha tani sutera alam di Soping alat pemintalannya relatif tradisional, usaha disini dilakukan turun - temurun dan menjadi usaha rakyat serta kurang membuka diri terhadap pengetahuan baru dari luar.

Novianti (1997) menganalisis keunggulan komparatif dan kompetitif perusahaan kokon sebagai bahan baku benang sutera di enam kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini didasarkan pada instar dan jenis telur yang digunakan yaitu instar 3 dan 4 masing – masing untuk jenis lokal dan impor.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara finansial dan ekonomi, perusahaan kokon menguntungkan dalam berbagai pola produksi dengan keuntungan tertinggi dicapai pada pola dengan instar 4 impor. Hasil analisis keunggulan komparatif dan kompetitif dengan analisis biaya sumber sumberdaya domestik menunjukkan bahwa untuk semua pola produksi, perusahaan kokon memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yaitu dengan nilai KBSD lebih kecil dari satu. Hasil analisisnya juga menunjukkan bahwa perusahaan kokon lebih memiliki keunggulan komparatif dibanding keunggulan kompetitif, artinya, tanpa intervensi pemerintah, perusahaan kokon sudah memiliki keunggulan komparatif.

Jakaria (2000), mengadakan penelitian tentang Analisis Interaktif Genotipe – Lingkungan Pada Beberapa Sifat Kuantitatif Ulat Sutera (*Bombyx mori L.*). Dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya interaksi genotipe – lingkungan yang menimbulkan masalah serius pada sifat – sifat kuantitatif ulat sutera, kecuali pada sifat bobot badan instar IV, bobot badan instar V dan daya tahan hidup larva. Dengan demikian anggapan bahwa bibit ulat sutera impor (702 dan 703) akan mengalami interaksi genotipe – lingkungan ternyata pengaruhnya kecil ketika dipelihara pada suhu 35⁰ C selama 6 jam per hari. Hal ini karena ekspresi fenotipe atau formula ulat sutera 702 dan 703 tetap lebih tinggi dibandingkan ulat sutera poli, kecuali sifat daya tahan hidup larva yang daya tetas telur.

Jamila (2000), mengadakan penelitian tentang penggunaan kalsium propionat dan kalium sorbat sebagai bahan pengawet pada pakan buatan ulat sutera (*Bombyx mori*). Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penambahan bahan pengawet kalsium propionat dan kalium sorbat dapat menurunkan jumlah jamur yang tumbuh pada pakan buatan ulat sutera. Ditemukan perbedaan nyata pada jumlah jamur yang ditambahkan kalsium propionat 2000 mg dan kalium sorbat 100 mg dengan waktu pemberian 4 hari sekali, yang menghasilkan jumlah jamur tertinggi. Pada penambahan bahan pengawet kalsium propionat, kalium sorbat dan waktu pemberian menghasilkan konsumsi yang berbeda nyata antara waktu pemberian 2 hari sekali dengan 4 hari sekali. Penambahan bahan pengawet kalsium propionat, kalium sorbat dengan waktu penambahan 2 hari sekali dan 4 hari sekali

tidak berpengaruh nyata pada pertumbuhan ulat sutera instar IV. Dari parameter yang diukur pada produksi kokon mencakup bobot kokon, bobot kulit kokon, persentase kokon tanpa pupa, panjang filamen, bobot filamen, tebal serat (tebal denier) dan daya gulung filamen, tidak ditemukan perbedaan yang berpengaruh nyata pada interaksi kalsium propionat, kalium sorbat dan waktu pemberian.

Elis Suyono (2002) melakukan penelitian tentang identifikasi kondisi dan potensi budidaya ulat sutera di Kabupaten Wonosobo, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh *data base* petani budidaya ulat sutera di Kabupaten Wonosobo.

Elis Suyono (2003) mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan profil budidaya ulat sutera di Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini berskala nasional yang dikoordinir oleh Program Kemitraan Bagi Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL) Pusat (Bappenas) yang meliputi delapan belas kabupaten yang tercakup dalam tujuh propinsi

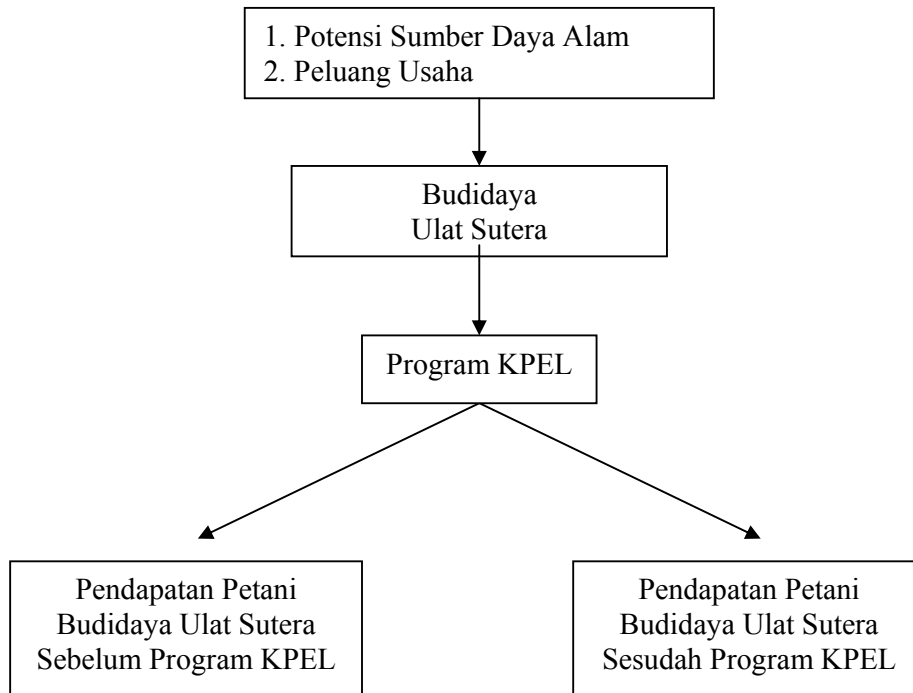
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Budidaya ulat sutera dikembangkan di Indonesia berdasarkan beberapa pertimbangan, salah satunya didasarkan atas kecocokan agroklimat dan adanya peluang bagi Indonesia khususnya lagi bagi Kabupaten Wonosobo untuk memenuhi permintaan sutera alam dalam negeri yang masih belum terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dibutuhkan program untuk meningkatkan pengembangan budidaya ulat sutera karena harga jual kokon dipengaruhi oleh mutu kokon yang

dihasilkan. Semakin baik pemeliharaan ulat maka mutu kokon yang dihasilkan akan semakin baik pula, sehingga harga jual akan semakin tinggi dan pendapatan petani akan semakin besar. Dengan semakin tingginya harga jual kokon, maka petani akan terdorong untuk meningkatkan produksi, sehingga pendapatan yang diterima petani juga meningkat.

Salah satu program yang dicanangkan Pemerintah Pusat dalam rangka pengembangan ekonomi lokal adalah Program Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL). Program ini diharapkan mampu memberikan solusi bagi Pemerintah Daerah yang ada di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dalam rangka pengembangan ekonomi lokal yang salah satunya adalah pengembangan budidaya ulat sutera di Kabupaten Wonosobo. Berikut kerangka pemikiran Program Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal di Kabupaten Wonosobo.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Diolah dan dikembangkan dari tinjauan pustaka

2.4 Hipotesis

Berdasarkan pada latar belakang, tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu serta mengacu pada tujuan penelitian, maka untuk memberikan jawaban sementara atas rumusan masalah dapat diajukan rumusan hipotesis sebagai berikut:

- 1. Ada perbedaan luas lahan tanaman murei antara sebelum dan sesudah mengikuti program KPEL**
- 2. Ada perbedaan kuantitas jumlah produksi kokon antara sebelum dan sesudah mengikuti program KPEL**

- 3. Ada perbedaan jumlah tenaga kerja antara sebelum dan sesudah mengikuti program KPEL**
- 4. Ada perbedaan jumlah pendapatan antara sebelum dan sesudah mengikuti program KPEL**
- 5. Ada perbedaan jumlah tabungan antara sebelum dan sesudah mengikuti program KPEL**
- 6. Ada perbedaan kemandirian antara sebelum dan sesudah mengikuti program KPEL**

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Definisi Operasional Variabel

Yang dimaksud dengan luas lahan dalam penelitian ini adalah luas areal kebun murbei dalam satuan hektar (merupakan lahan yang dipakai untuk menanam murbei)

Yang dimaksud dengan jumlah produksi dalam penelitian ini adalah jumlah hasil kokon dari budidaya ulat sutera dengan ukuran satuan kilogram

Yang dimaksud dengan tenaga kerja dalam penelitian ini adalah tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi untuk persiapan bibit murbei, pengolahan kebun murbei, penanaman batang murbei, pemeliharaan kebun murbei, pemanenan daun murbei, pengangkutan, persiapan membuat kandang ulat sutera, penataan kandang ulat sutera, pemeliharaan ulat sutera, panen kokon sampai kepada penanganan pasca panen yaitu pemasaran kokon, Tenaga kerja dalam hal ini dengan satuan orang

Yang dimaksud dengan pendapatan dalam penelitian ini adalah selisih antara jumlah modal yang digunakan dalam proses produksi budidaya ulat sutera dengan jumlah harga jual kokon setelah panen, pendapatan yang dimaksud disini dengan satuan rupiah

Yang dimaksud dengan tabungan dalam penelitian ini adalah simpanan uang petani budidaya ulat sutera yang merupakan hasil dari budidaya ulat sutera,

simpanan inibisa bersifat harian, mingguan dan bulanan. pendapatan yang dimaksud disini dengan satuan rupiah

Yang dimaksud dengan kemandirian dalam penelitian ini adalah tingkatan kondisi mental yang dimiliki petani budidaya ulat sutera yang didukung dengan kepercayaan diri, keyakinan dan kemampuan untuk mengelola usaha budidaya ulat sutera dengan baik dan mampu memperoleh keuntungan maksimal.

3.2. *Jenis dan Sumber Data*

Sumber data mempunyai peran sangat penting dalam penelitian karena dengan adanya sumber data, peneliti akan mendapatkan data yang dapat digunakan untuk mengetahui segala informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan .

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dengan cara langsung dari responden. Sumbernya melalui wawancara. Data primer pada penelitian ini berupa pertanyaan berkaitan dengan pengembangan budidaya ulat sutera di Kabupaten Wonosobo melalui program KPEL.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yakni : melalui arsip, literatur maupun laporan-laporan yang mendukung penelitian ini.

3.3. *Populasi dan Sampel*

Masalah yang dihadapi para peneliti terhadap populasi penelitian adalah bagaimana membuat pernyataan bagi keseluruhan populasi tanpa mengamati atau mengukur semua unit. Untuk mengatasi masalah ini yaitu

dengan benar-benar mengamati bagian dari populasi penelitian yang disebut sampel.

Karena luasnya populasi yang harus diteliti dan mengingat keterbatasan waktu, biaya dan tenaga, maka peneliti hanya menggunakan sejumlah responden yang dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 30 orang dari 97 orang petani ulat sutera alam di Kabupaten Wonosobo yang sudah menghasilkan kokon, yang didasarkan pada ukuran sampel minimum dengan mengambil sampel 10 % dari tiap-tiap skala usaha (Gay dalam Sevilla, 1993). Cara pemilihan responden dilakukan secara acak per skala usaha. Hal ini didasarkan pada pertimbangan luasan lahan yang diusahakan para petani dalam mengelola usahanya, antara lain 0,5 - 0,75 ha, 0,75 - 1,00 ha dan 1,00 - 1,50 ha, 1.50 – 2,00 dan 2,00 ke atas dengan jumlah responden masing-masing skala usaha adalah 4, 6, 5, 7, 8. Kerangka penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari daftar nama-nama petani ulat sutera yang diperoleh dari FEDEP Kabupaten Wonosobo sebagai pendamping Pengembangan budidaya ulat sutera di Kabupaten Wonosobo. Tehnik penentuan sampel di atas menggunakan *proporsif stratified random sampling*. Masri Singarimbun, (1987). Maksudnya : *Proporsif*, karena sampel yang dipilih adalah petani budidaya ulat sutera yang terlibat dalam program KPEL. *Stratified*, karena berdasarkan strata luas lahan kebun murbei dan *Random Sampling*, karena untuk setiap kelas/skala dipilih secara acak dengan cara diundi. Penentuan responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1
 Penentuan Jumlah Responden
 Berdasarkan Masing Masing Skala Luas Lahan

No.	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Petani (Orang)	Jumlah Responden	Prosentase (%)
01	200 -	26	8	30
02	1.50 – 2.00	22	7	30
03	1.00 – 1.50	16	5	30
04	0,75 – 1.00	20	6	30
05	0,5 – 0,75	13	4	30
Jumlah		97	30	30

Sumber : Data Primer

Jumlah sampel yang diambil pada penelitian ini adalah 30 petani ulat sutera atau 30 % dari total populasi yang ada (petani ulat sutera yang sudah menghasilkan kokon). Besarnya sampel 30% dari total populasi, didasarkan pada pendapat Masri Singarimbun yang menyatakan :
 “..... Banyaknya sampel yang harus diambil untuk mendapatkan data yang representatif, beberapa peneliti menyatakan bahwa besarnya sampel

tidak boleh kurang dari 10% dan ada pula peneliti yang menyatakan bahwa besarnya sampel minimal 5% dari jumlah elemen *populasi* (Masri Singarimbun, 1989 : 82).

3.4 Metode Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi, maksudnya adalah bahwa data yang dikumpulkan tersebut melalui literatur-literatur yang ada dan buku-buku lainnya yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.
- b. Studi Lapangan (*Study Field*), maksudnya adalah:
 - 1) Observasi, biasa disebut dengan pengamatan langsung adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.
 - 2) Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab langsung sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).
 - 3) Kuesioner, yaitu pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang cukup terperinci dan lengkap.

3.5 Teknis Analisis

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS. Sedangkan untuk menguji perbedaan variabel sebelum dan sesudah mengikuti program kemitraan bagi pengembangan ekonomi lokal melalui pendampingan dilakukan dengan menggunakan uji Pangkat Tanda Wilcoxon.

Data hasil penelitian dari 30 (Tiga Puluh) orang / responden tentang variabel yang diteliti (luas lahan, jumlah produksi, jumlah tenaga kerja, pendapatan rata-rata, tabungan rata-rata dan tingkat kemandirian). Yang diperoleh pada awal periode waktu pengamatan pada bulan Januari 2002 (sebelum pendampingan) dibandingkan dengan data pada akhir periode waktu pengamatan pada bulan Desember 2005 (setelah program). Pada awalnya kedua data tersebut dilakukan uji normalitas guna membentuk kenormalan distribusi frekuensi data. Setelah diketahui bahwa hasil uji normalitas menunjukkan distribusi data ternyata tidak normal, maka alat uji statistik yang dipakai adalah uji statistik non parametrik.

Uji statistik Pangkat Tanda Wilcoxon digunakan sebagai uji beda dengan alasan data yang diteliti berasal dari sejumlah responden yang sama dan berkaitan dengan periode waktu pengamatan yang berbeda. Di antara periode waktu pengamatan tersebut setelah dilakukan program KPEL. Yaitu pemberian pelatihan, pendampingan dan konsultasi selama periode waktu pengamatan. Dengan uji pangkat tanda Wilcoxon penelitian ini akan menguji apakah ada perbedaan pada variabel-variabel yang diamati pada awal periode pengamatan dan pada akhir periode pengamatan.

Adapun variabel-variabel yang diamati adalah luas lahan, jumlah produksi, jumlah tenaga kerja, pendapatan rata-rata, tabungan dan kemandirian. Setelah uji pangkat tanda Wilcoxon dilakukan akan muncul nilai Z (*based on negative ranks*) dan nilai probabilitas p dengan rumus sebagai berikut :

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Keterangan : X : Variabel

μ, σ^2 : Rata-Rata

Pada penelitian ini, hipotesis nol diterima apabila nilai $p \leq 0,05$. dan hipotesis nol ditolak apabila nilai $p > 0,05$

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1 Letak Geografi

Wonosobo adalah merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Jawa Tengah. Kabupaten Wonosobo terletak antara 7° 11' 13" dan 7°04'11" Lintang Selatan dan antara 109° 43' 10" dan 110° 04' 40" Bujur Timur, yang berjarak 120 kilometer dari Ibukota Propinsi Jawa Tengah (Semarang) dan 520 kilometer dari Ibukota negara (Jakarta). Kabupaten Wonosobo terletak berbatasan dengan Kabupaten tetangga sebagai berikut :

1. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang.
2. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang.
3. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo.
4. Di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara.

Secara administratif Kabupaten Wonosobo terbagi menjadi 4 (empat) Wilayah Pembantu Bupati dan 13 (tiga belas) Kecamatan. (ini pada masa pemerintahan Orde Baru). Akan tetapi setelah munculnya reformasi yang didukung pula UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo sekarang terdiri dari 15 Kecamatan dan 264 Desa/Kelurahan. Empat

Wilayah Pembantu Bupati saat ini juga dihapus dan sudah tidak berfungsi lagi secara formal. Namun secara non formal sampai sekarang keempat wilayah dimaksud masih sering dipakai untuk koordinasi baik pembangunan maupun bidang – bidang lain, baik yang dilakukan pemerintah maupun organisasi - organisasi sosial kemasyarakatan, maupun politik dan ekonomi yang ada di Kabupaten Wonosobo, hal ini semata-mata untuk memudahkan koordinasi agar pelaksanaan bisa efektif dan efisien.

Tabel 4.1
Tabel Jumlah Kecamatan, Luas Wilayah,
Jumlah Desa dan Jumlah Kelurahan

Jumlah Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
Wonosobo	3.238	7	12
Garung	5.122	14	1
Kejajar	5.762	15	1
Mojotengah	4.507	16	3
Watumalang	6.823	15	1
Selomerto	3.971	23	1
Leksono	4.407	13	1
Sukoharjo	3.971	17	-
Kaliwiro	11.500	23	1
Wadaslintang	12.716	16	1
Kretek	6.214	19	2
Kalikajar	8.330	18	1
Sapuran	9.886	19	1
Kepil	9.387	20	1
Kalibawang	4.782	8	1
15	89.468	236	28

Sumber : Wonosobo Dalam Angka, 2003

Berbeda dengan kebanyakan Kabupaten lain di Jawa Tengah, Kabupaten Wonosobo ini merupakan dataran tinggi (daerah pegunungan) dengan ketinggian 270 dan 2250 M di atas permukaan laut.

4.2 Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Wonosobo tercatat 98.468 Ha. Atau 3 % dari luas Propinsi Jawa Tengah. Luas wilayah tersebut terdiri dari 18.564 Ha (19 %) berupa lahan sawah dan 79.904 Ha (81 %) bukan lahan sawah. Masyarakat daerah pegunungan ini menyebutnya dengan istilah Tegalan.

4.3 Keadaan Iklim

Sebagaimana keadaan iklim pada umumnya di Indonesia, Kabupaten Wonosobo beriklim tropis dengan dua musim dalam satu tahun. Yakni musim kemarau dan musim hujan. Rata-rata suhu udara di Kabupaten Wonosobo antara 24 – 30 derajat Celcius pada malam hari. Bahkan pada bulan Juli dan Agustus turun menjadi 12 –15 derajat Celcius pada siang hari. Di daerah ini hujan turun hampir sepanjang tahun, pada tahun 2001 rata-rata hari hujan kurang lebih 196 hari dengan curah hujan rata-rata 4495 mm. Dimana curah hujan tertinggi di Kecamatan Kepil (552 mm), dan terendah di Kecamatan Watumalang (152 mm.). Demikian juga hari hujan, terbanyak di Kecamatan Kepil (21 hari) dan terendah di Kecamatan Watumalang (7 hari). (*Wonosobo Dalam Angka, 2003*)

4.4 Pengembangan Budidaya Ulat Sutera

Sebagaimana telah dijelaskan dimuka bahawa peluang masyarakat Indonesia untuk mengembangkan budidaya ulat sutera baik yang menghasilkan kokon maupun produk turunannya berupa benang sutera maupun kain sutera masih sangat terbuka luas. Tak terkecuali masyarakat di Kabupaten Wonosobo, sejak tahun 1989 sudah mulai mengembangkan budidaya ulat sutera. Bahkan berdasarkan data dari Forum For Economic Development and Employment Promotion (FEDEP) Kabupaten Wonosobo, dari tahun ke tahun jumlah petani yang berbudidaya ulat sutera selalu mengalami peningkatan sangat pesat.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo bersama–sama masyarakat mengembangkan budidaya ulat sutera didasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut : 1). Pengembangan budidaya ulat sutera memiliki prospek sangat baik.
2). Kebutuhan benang sutera dalam negeri baru tercukupi 30 % dari produk lokal.
3). Iklim dan lingkungan di Kabupaten Wonosobo sangat mendukung. Seperti Suhu udara yang dingin sangat mendukung tumbuh dan suburnya tanaman murbei
4). Banyak lahan tegalan yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

Pada awalnya (1989) baru ada 1 (satu) petani yang berbudidaya ulat sutera. Namun melalui beberapa sosialisasi baik yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan pada waktu itu, sekarang Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Wonosobo maupun petani yang bersangkutan, perkembangannya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Perkembangan ini secara kuantitatif dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tahap Pertama Tahun 1998

Pada tahap awal ini baru terdapat 1 (satu) orang petani yakni Mufrod, seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama RI yang bertempat tinggal di Desa Tracap, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, pada waktu itu beliau menanam murbei 1,5 Ha.

Tahap Kedua Tahun 1999

Pada tahap kedua ini, perkembangan jumlah petani mengalami kenaikan dari 1 petani, menjadi 11 orang, petani produksi 11 orang dengan luas lahan 14,5 Ha.

Tahap Ketiga Tahun 2000

Pada tahap ketiga ini perkembangan jumlah petani bidaya ulat Sutera di luar dugaan. Dimana pada tahap kedua petani berjumlah 11 orang, pada tahap ini berkembang menjadi 41 orang. Petani produksi kokon sebanyak 23 orang dengan luas lahan 39,6 Ha.

Tahap Keempat Tahun 2001

Pada tahap keempat ini jumlah petani masih tetap mengalami peningkatan sehingga berjumlah 101 orang, petani produksi sebanyak 44 orang, dengan luas lahan menjadi 97, 5 Ha.

Tahap Kelima Tahun 2002

Pada tahap ini jumlah petani masih juga mengalami peningkatan sebagaimana tahun–tahun sebelumnya yakni menjadi 131 orang dengan luas lahan 120,75 ha.

Tahap Keenam Tahun 2003

Pada tahap ini jumlah petani mencapai 161 orang. Ini berarti ada penambahan 30 orang petani. Petani produksi sebanyak 74 Orang. Data ini diperoleh berdasarkan jumlah petani pemula yang diikuti sertakan dalam Pelatihan dan Pemagangan Petani Ulut Sutera di Kabupaten Wonosobo di PSA. Desa Regaloh, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, diperkuat dengan hasil pertemuan petani dengan FEDEP, KSU dan dinas instansi terkait di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wonosobo (*Elis Suyono, 2003*).

Tahap Ketujuh Tahun 2004

Pada tahap ini jumlah petani tidak mengalami peningkatan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, hanya ada penambahan 16 orang yang bergabung. Jadi jumlah keseluruhan petani budidaya ulat sutera pada tahap ini sebanyak 177 orang. Jumlah petani produksi sebanyak 97 orang. Dengan luas lahan 162,8 Ha. Secara terperinci perkembangan jumlah petani budidaya ulat sutera di Kabupaten Wonosobo dapat diketahui pada tabel 4.2

Tabel 4.2

Perkembangan Jumlah Petani Budidaya Ulut Sutera di Kabupaten Wonosobo

Tahun	Jumlah Petani	Luas Lahan (Ha)	Petani Produksi	Petani belum Produksi
1998	1 Petani	1.5	1 Petani	-
1999	11 Petani	14.5	11 Petani	-
2000	41 Petani	39.6	23 Petani	18 Petani
2001	101 Petani	97.5	44 Petani	57 Petani
2002	131 Petani	120.75	53 Petani	78 Petani
2003	161 Petani	156.1	74 Petani	87 Petani
2004	177 Petani	162.8	97 Petani	80 Petani

Sumber : Dari FEDEP Kabupaten Wonosobo, 2004

Sekali lagi sebagaimana telah dikemukakan dimuka bahwa pemilihan Kabupaten Wonoosbo sebagai daerah penelitian didasarkan kepada beberapa pertimbangan sebagai berikut : 1) Kabupaten Wonosobo sejak tahun 1998 telah mengembangkan budidaya ulat sutera yang dipromotori oleh dinas kehutanan dan

perkebunan. 2). Dari tahun ke tahun jumlah petani secara kuantitatif selalu mengalami peningkatan. 3). Kabupaten Wonosobo menjadi satu-satunya Kabupaten di Indonesia yang mengembangkan budidaya ulat sutera melalui program KPEL

4.5 Profil Petani Budidaya Ulat Sutera

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah petani budidaya ulat sutera yang ada di Kabupaten Wonosobo sebanyak 177 orang petani yang tersebar di 14 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Wonosobo. dengan luas lahan 162.8 ha. Jumlah petani produksi kokon sebanyak 97 orang dan petani yang belum produksi kokon sebanyak 80 orang. Banyaknya jumlah petani yang belum produksi ini berdasarkan data dikarenakan terbatasnya modal usaha. (Untuk membuat kandang ulat, seriframe sampai kepada penanganan pasca panen) Namun demikian bagi petani yang belum produksi kokon daun murbeinya dimanfaatkan (dibeli) petani lain yang sudah memproduksi kokon namun masih kekurangan daun murbei untuk memberi makan ulat sutera.

Berkaitan dengan umur responden. Ternyata berdasarkan data yang terkumpul umur responden menunjukkan usia produktif. Yaitu antara 20 - 60 tahun, secara terperinci umur responden bisa dilihat pada tabel 4.3

Tabel 4.3
Umur Responden
Petani Budidaya Ulat Sutera di Kabupaten Wonosobo

No	Umur Responden (Th)	Jumlah Responden	Prosentase (%)
01	60 >	2	6,67
02	50 – 59	8	26,67
03	40 – 49	12	0,40
04	30 – 39	7	23,33
05	20 – 29	1	3,33
JUMLAH		30	100

Sumber : Data primer

Tingkat Pendidikan

Sebagian kalangan (cendekiawan, usahawan, ilmuwan dan sebagainya) mengatakan bahwa pendidikan merupakan piranti yang sangat ampuh untuk merubah seseorang dari kondisi yang kurang baik menjadi kondisi yang baik bahkan mungkin kondisi yang lebih baik. Artinya bagi mereka yang berpendidikan rendah tentunya kreativitas mereka juga kurang, jika dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan lebih tinggi, hal ini juga berlaku untuk pendapatan sebagai imbas dari kreatifitas mereka.

Berkaitan dengan tingkat pendidikan, dari data yang terkumpul sebanyak 30 responden, semuanya berpendidikan formal, namun tingkat pendidikan mereka tidak sama. 0 % tidak sekolah, 0 % tidak tamat SD, sebanyak 1 responden (3,33 %) tamat SD, 15 responden (50 %) tamat SLTP, 11 responden (36,67 %) tamat SLTA dan sisanya sebanyak 3 responden (10 %) sudah pernah kuliah di perguruan tinggi, namun 1 responden yang hanya selesai sarjana muda. Secara terperinci, tingkat pendidikan responden dapat diketahui pada tabel 4.4

Tabel 4.4
Tingkat Pendidikan Responden
Petani Budidaya Ulat Sutera di Kabupaten Wonosobo

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	Prosentase (%)
01	Tidak Sekolah	-	-
02	Tidak tamat SD	-	-
03	Tamat SD	1	3,33
04	Tamat SLTP	15	50
05	Tamat SLTA	11	36,67
06	Perguruan Tinggi	3	10

JUMLAH	30	100
--------	----	-----

Sumber : Data primer

Tingkat pendidikan responden tidak menjadi dasar (tidak diperhitungkan) berkaitan dengan keikutsertaan mereka dalam program KPEL. Justru program KPEL didesain untuk meningkatkan kemampuan kapasitas petani berinteraksi dengan yang lain, melalui beberapa kegiatan seperti : Pelatihan budidaya tanaman murbei, budidaya ulat sutera, manajemen usaha, teknik negosiasi sampai kepada penanganan produk pasca panen (pemasaran) diharapkan mampu meningkatkan sumber daya petani budidaya ulat sutera

Luas Lahan

Dalam usaha dibidang pertanian dan perkebunan ada asumsi yang mengatakan bahwa jumlah produksi sangat dipengaruhi oleh luas lahan, hal ini juga berlaku untuk petani budidaya ulat sutera. Budidaya ulat sutera sangat tergantung pada budidaya tanaman murbei, namun berdasarkan data yang terkumpul bisa terjadi yang memiliki lahan sedikit tapi berbudidaya ulat sutera lebih banyak maka hasilnya pun lebih banyak. Hal ini terjadi pada budidaya ulat sutera di Kabupaten Wonosobo,

Berdasarkan data ada 80 petani budidaya tanaman murbei yang belum berbudidaya ulat sutera. Daun dari 80 petani yang baru budidaya tanaman murbei ini bisa dimanfaatkan oleh petani yang sudah budidaya ulat sutera namun masih kekurangan daun untuk memberi makan ulat sutera. Inilah yang terjadi pada petani budidaya ulat sutera di Kabupaten Wonosobo. Secara terperinci luas lahan responden sebelum dan sesudah mengikuti program KPEL dapat dilihat pada tabel 4.5

Tabel 4.5
Luas Lahan Responden
Sebelum dan Sesudah Mengikuti Program KPEL

No.	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Responden		Prosentase Kenaikan (%)
		Sebelum	Sesudah	
1.	2.00 >	4	8	100
2.	1.51 – 2.00	2	7	250

3.	1.01 – 1.50	4	5	25
4.	0.75 – 1.00	11	6	-45,5
5.	0.50 – 0.74	9	4	-55,6
	Jumlah	30	30	

Sumber : Data Primer

Produksi Kokon

Kokon merupakan produk yang dihasilkan petani budidaya ulat sutera di Kabupaten Wonosobo, berdasarkan data yang diperoleh peneliti jumlah produksi kokon responden tidak semuanya mengalami peningkatan secara kuantitatif. Jumlah produksi kokon sangat tergantung dengan jumlah budidaya ulat sutera per bok. Semakin banyak jumlah budidaya ulat sutera (dengan ukuran boks), maka semakin banyak pula kokon yang dihasilkan. Berdasarkan teori budidaya ulat sutera bisa panen kokon 1 bulan sekali, tergantung ketersediaan daun murbei dan kemauan petani untuk budidaya ulat sutera. Adapun jumlah produksi kokon responden antara sebelum dan sesudah mengikuti program KPEL dapat dilihat pada tabel 4.6

Tabel 4.6
Jumlah Produksi Kokon Responden
Sebelum dan Sesudah Mengikuti Program KPEL

No.	Jumlah Produksi (Kg)	Jumlah Responden		Prosentase Kenaikan (%)
		Sebelum	Sesudah	
1.	2.000 >	-	1	100
2.	1.501 – 2.000	-	5	500

3.	1.001 – 1.500	6	14	133,3
4.	501 – 1.000	15	10	-33,3
5.	< 500	9	-	-900
	Jumlah	30	30	

Sumber : Data primer

Tenaga Kerja

Tenaga kerja yang dimaksud disini adalah tenaga kerja yang dipekerjakan responden dalam berbudidaya tanaman murbei dan budidaya ulat sutera termasuk didalamnya penanganan pasca panen. Berbeda dengan kebanyakan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja, dalam usaha budidaya ulat sutera responden tidak pernah menghitung tenaga kerja sendiri dan tenaga kerja keluarga. (anak-istri-menantu-sucu dan mertua) yang diperhitungkan adalah tenaga kerja dari luar yang benar-benar diperkejakan dan mendapatkan upah untuk setiap bulannya.

Berdasarkan teori, budidaya ulat sutera dengan kapasitas 1 bok membutuhkan tenaga kerja 1 orang. Namun realitasnya kebanyakan responden mengabaikan teori tersebut, bahkan menurut sebagian responden, jika 1 bok ulat dipekerjakan 1 orang tenaga kerja waktunya terlalu longgar dan bersantai-santai, sehingga rata-rata jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan responden dalam berbudidaya ulat sutera berkisar antara 1 sampai 5 tenaga kerja tergantung dengan banyak sedikitnya ulat sutera yang budidayakan (berapa bok) Berkaitan dengan jumlah tenaga kerja responden antara sebelum dan sesudah mengikuti program KPEL dapat dilihat pada tabel 4.7

Tabel 4.7
Jumlah Tenaga Kerja Responden

Sebelum dan Sesudah Program KPEL

No.	Tenaga Kerja	Jumlah Responden		Prosentase Kenaikan (%)
		Sebelum	Sesudah	
1.	5 Orang	-	3	300
2.	4 Orang	-	4	4005
3.	3 Orang	3	4	33,33
4.	2 Orang	18	19	56
5.	1 Orang	9	-	-900
	Jumlah	30	30	

Sumber : Data primer

Penggunaan tenaga kerja pada awal budidaya ulat sutera (ulat masih dalam instar 1 sampai 3) belum begitu membutuhkan banyak pekerjaan. Pekerjaan banyak baru setelah ulat mau menjadi kokon.

Tingkat Pendapatan

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui jumlah pendapatan rata – rata petani budidaya ulat sutera sebelum mengikuti program KPEL dan jumlah pendapatan rata–rata petani budidaya ulat sutera sesudah mengikuti program KPEL. Pendapatan rata–rata responden yang dimaksud adalah pendapatan rata–rata bersih responden (selisih antara harga jual kokon dikurangi modal usaha (merawat dan budidaya tanaman murbei, membeli telur ulat sutera dan budidaya ulat sutera) dihitung pertahun. Secara terperinci pendapatan rata–rata responden antara sebelum dan sesudah mengikuti program KPEL dapat dilihat pada tabel 4.8

Tabel 4.8
Pendapatan Rata-rata Responden
Sebelum dan Sesudah Program KPEL

No.	Jumlah Pendapatan (Rp.)	Jumlah Responden		Prosentase Kenaikan (%)
		Sebelum	Sesudah	
1.	20.000.001 >	-	6	600
2.	15.000.001 – 20.000.000	-	-	0
3.	10.000.001 – 15.000.000	3	14	366,7
4.	5.000.001 – 10.000.000	4	10	150
5.	< 5.000.000	23	-	-2.300
	Jumlah	30	30	

Sumber : Data primer

Tabungan

Tabungan adalah sejumlah uang yang disimpan responden baik di Bank maupun yang disimpan di lembaga keuangan mikro (Koperasi Simpan Pinjam-KSP, Koperasi Petani, Kelompok Tani dan sebagainya), pada kenyataannya, responden tidak semuanya menabung uang di lembaga yang telah disebutkan diatas, menabung menurut responden tidak harus dilakukan yang bersangkutan (responden), akan tetapi tabungan anak di sekolah (bagi yang masih memiliki anak sekolah) dihitung sebagai tabungan. Tabungan di sini dihitung per tahun.

Jika melihat tabel di bawah, jumlah tabungan petani budidaya ulat sutera (responden) di Kabupaten Wonosobo sangatlah kecil yakni kurang dari Rp. 1.000.000 per tahun. Bukan besarnya tabungan yang menjadi prioritas responden dalam berbudidaya ulat sutera, akan tetapi prioritasnya ada pada kelangsungan hidup. Artinya kebutuhan primer responden bisa tercukupi terlebih dahulu. Baru memikirkan kebutuhan sekunder termasuk didalamnya menabung. Secara

terperinci jumlah tabungan rata-rata perbulan responden dapat diketahui pada tabel 4.9.

Tabel 4.9
Jumlah Tabungan Rata-Rata Responden per tahun
Sebelum dan Sesudah Program KPEL

No.	Jumlah Tabungan (Rp.)	Jumlah Responden		Prosentase Kenaikan (%)
		Sebelum	Sesudah	
1.	< 250.000	6	3	-50
2.	750.000 – 1.000.000	8	6	-25
3.	500.000 – 750.000	6	5	-16,7
4.	750.000 – 1.000.000	8	6	-25
5.	1.000.000 >	-	8	800
	Jumlah	30	30	

Sumber : Data Primer

Tingkat kemandirian

Kemandirian adalah tingkat kondisi mental responden yang didukung oleh kepercayaan diri, keterampilan, keyakinan dan kemampuan untuk mengelola budidaya ulat setelah selesainya program KPEL. Berdasarkan data yang telah terkumpul 8 responden (26,67 %) menyatakan belum mandiri, 6 responden (20 %) dalam proses mandiri dan 16 (53,33 %) menyatakan mandiri. Secara terperinci tingkat kemandirian responden dalam mengelola usaha budidaya ulat sutera dapat dilihat pada tabel 4.10

Tabel 4.10
Tingkat Kemandirian Responden
Dalam Mengelola Budidaya Ulat Sutera

No	Tingkat Kemandirian Responden	Jumlah Responden
01	Belum Mandiri	8
02	Dalam Proses Mandiri	6
03	Mandiri	16
JUMLAH		30

Sumber : Data primer

Tingkat kemandirian ini didukung oleh keikutsertaan responden dalam mengikuti beberapa kegiatan yang diselenggarakan melalui program KPEL. Beberapa kegiatan dimaksud antara lain : Pelatihan dan pemagangan teknik budidaya tanaman murbei, pelatihan dan pemagangan teknik budidaya ulat sutera, pelatihan manajemen usaha, studi lapangan dan studi banding, termasuk didalamnya pendampingan dan konsultasi yang dibimbing oleh FEDEP, Koperasi dan Kabupaten Support Unit (KSU) program KPEL

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan tujuan khusus dari penelitian ini yakni : ingin mengetahui pengaruh program Kemitraan bagi Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL) terhadap peningkatan pendapatan petani budidaya ulat sutera di Kabupaten Wonosobo, maka untuk memberikan informasi lengkap hasil penelitian digunakan 2 (dua) pendekatan analisis yakni : Analisis Deskriptif dan Analisis Uji Pangkat Tanda Wilcoxon sebagai analisis kuantitatif.

Melalui analisis deskriptif, peneliti berusaha memberikan gambaran secara umum tentang hasil penelitian secara kualitatif, sedangkan melalui analisis Uji Pangkat Tanda Wilcoxon, peneliti berusaha memberikan hasil penelitian secara kuantitatif yang merupakan uji hipotesis. Analisis ini juga sekaligus menjawab apakah program KPEL berpengaruh terhadap pendapatan petani budidaya ulat sutera di Kabupaten Wonosobo atau tidak. Berikut adalah uraian untuk masing-masing analisis.

5.1. Analisis Deskriptif

Kabupaten Wonosobo, sejak 7 tahun yang lalu telah mengembangkan budidaya ulat sutera, tepatnya pada tahun 1998. Sejak itu pula dari tahun ke tahun secara kuantitatif jumlah petani yang berbudidaya ulat sutera di daerah pegunungan ini terus mengalami peningkatan. Tidak hanya jumlah petani saja

yang meningkat, jumlah luas lahan tanaman murbei dan jumlah petani yang memproduksi kokon juga mengalami peningkatan.

Peningkatan jumlah petani, luas kebun murbei dan petani produksi kokon merupakan bukti keseriusan baik pemerintah maupun petani itu sendiri dalam mengembangkan budidaya ulat sutera menjadi klaster komoditas terpilih yang akan dikembangkan melalui program Kemitraan bagi Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL).

Kehadiran program Kemitraan bagi Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL) di Kabupaten Wonosobo disambut positif oleh stakeholder daerah yang menaruh perhatian khusus terhadap pengembangan budidaya ulat sutera, terutama pemerintah baik pemerintah Propinsi Jawa Tengah maupun pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Program KPEL tidak memberikan modal usaha bagi petani budidaya ulat sutera di Kabupaten Wonosobo, tetapi memberikan ketrampilan dan kemudahan akses berkaitan dengan pengembangan budidaya ulat sutera. Seperti : 1) Pelatihan budidaya tanaman murbei; 2) Pelatihan budidaya ulat sutera; 3) Pelatihan pengelolaan (manajemen) usaha; 4) Studi Banding; 5) Promosi produk; 6) Akses Modal; 7) Pemasaran hasil produk. Kegiatan-kegiatan di atas difasilitasi oleh bantuan manajemen Program KPEL Pusat melalui Kabupaten Suport Unit (KSU) yang merupakan pendamping di tingkat Kabupaten.

Keberhasilan program KPEL di Kabupaten Wonosobo, tidak hanya ditentukan oleh baiknya desain program oleh pemerintah pusat (Bappenas) semata, akan tetapi keterlibatan stakeholder daerah yang tergabung dalam FEDEP

juga memberikan andil yang cukup besar. Lebih-lebih pendamping di tingkat Kabupaten (KSU) program KPEL yang mampu berinteraksi dengan stakeholder daerah seperti, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, petani ulat sutera, lembaga keuangan, pengusaha lokal dan sebagainya.

Berdasarkan data yang terkumpul, bisa peneliti sampaikan bahwa selama program KPEL diimplementasikan, untuk pengembangan budidaya ulat sutera di Kabupaten Wonosobo mendapatkan stimulan berupa anggaran melalui APBD Propinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagai dana pendampingan. Untuk program ini pemerintah pusat hanya membiayai kegiatan KSU yang merupakan kepanjangan tangan dari pusat.

Kebijakan penggunaan anggaran dari pemerintah Propinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 750.000.000,- oleh Bappeda dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dinas Hutbun) Kabupaten Wonosobo, tidak sesuai dengan kebutuhan dan strategi pengembangan budidaya ulat sutera di Kabupaten Wonosobo. Contoh : pada tahun pertama program, strategi pengembangan budidaya ulat sutera yang disepakati bersama (FEDEP dan petani ulat sutera) adalah ekstensifikasi kebun murbei dan intensifikasi produk kokon. Akan tetapi yang terjadi adalah dana yang dimaksud habis untuk pelatihan, studi banding, bantuan bibit dan pembelian mesin pintal benang sutera. Sesuai dengan strategi pengembangan, pembelian mesin pintal benang sutera dilakukan pada tahun akhir program, sehingga produk kokon sudah mencukupi kebutuhan untuk dipintal setiap harinya.

Jadi anggaran dari propinsi lebih dari 90 % diperuntukkan untuk bantuan berupa fisik, seperti : bibit, seriframe, kandang ulat, mesin pintal benang sutera dan sebagainya. Bukan berarti gagal bantuan dari pemerintah propinsi, tetapi kurang tepat sasaran. Dengan kejadian semacam ini sebagian besar petani budidaya ulat sutera kecewa. Karena seolah-olah petani hanya menjadi oyek saja. Namun demikian kekecewaan ini segera terobati dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh FEDEP dan KSU program KPEL dalam memobilisasi sumber daya yang ada di Kabupaten Wonosobo.

Keberhasilan program KPEL di Kabupaten Wonosobo tidak luput dari upaya penguatan kelembagaan yang difasilitasi oleh KSU program KPEL, baik penguatan kelembagaan di tingkat kelompok petani maupun forum yang ada di tingkat Kabupaten (FEDEP).

Penguatan kelembagaan di tingkat kelompok tani dilakukan rutin 1 bulan sekali, kecuali ada permasalahan atau informasi penting yang segera harus disampaikan kepada seluruh petani budidaya ulat sutera. Jika terjadi hal seperti ini pertemuan kadang bisa 2 sampai 3 kali dalam 1 bulan. Pertemuan dalam rangka penguatan kelembagaan ini membahas masalah-masalah yang berkembang di seputar budidaya ulat sutera, mulai dari budidaya tanaman murbei, budidaya ulat sutera, pengelolaan usaha, modal, teknologi sampai kepada penanganan pasca panen (pemasaran).

Koperasi pelangi sutera alam juga terbentuk atas prakarsa program KPEL, koperasi inilah yang akan mengatur sirkulasi kebutuhan petani budidaya ulat sutera di Kabupaten Wonosobo seperti : bibit, pupuk, telur ulat sutera sampai

kepada pembelian hasil kokon dari petani. Yang dimaksud disini adalah : kebutuhan petani berkaitan dengan budidaya ulat sutera dicukupi oleh Koperasi terlebih dahulu (bagi petani yang kurang cukup modal), nanti produk (kokonnya) dijual ke koperasi sebagai kompensasi kebutuhan budidaya ulat sutera yang dicukupi koperasi. Penjualan harus lewat koperasi dimaksudkan agar hutang petani dari koperasi bisa dibayar dengan cara potong hasil penjualan kokon. Contoh: Iqbal – Bayu dan Naufal adalah petani budidaya ulat sutera, mereka sepakat untuk menjadi satu kelompok, sudah punya kebun murbei tetapi kurang modal untuk berbudidaya ulat sutera, mereka mengambil telur ulat sutera 2 boks dari koperasi senilai Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

Mereka budidaya ulat sutera dari telur yang diambil dari koperasi tersebut, setelah panen mereka menjual kokon hasil dari budidaya ulat sutera kepada koperasi dimana mereka mengambil telur ulat sutera. Kokon ditimbang hasilnya 70 kg. Dengan harga Rp. 20.000,- per kg. Jadi $70 \text{ kg} \times \text{Rp. } 20.000,- = \text{Rp. } 1.400.000,-$ uang hasil penjualan kokon Iqbal-Bayu dan Naufal dipotong harga telur ulat sutera 2 bok Rp. 90.000,- jadi mereka masih membawa pulang uang hasil penjualan kokon $\text{Rp. } 1.400.000,- - \text{Rp. } 90.000,- = \text{Rp. } 1.310.000,-$

Berdasarkan data yang terkumpul dan setelah diadakan analisis kuantitatif, ternyata Program KPEL di Kabupaten Wonosobo berhasil. Keberhasilan ini terbukti dari 6 variabel (luas lahan, jumlah produksi, jumlah tenaga kerja, pendapatan rata-rata, tabungan rata-rata dan kemandirian) yang diteliti semuanya mengalami perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah mengikuti program KPEL.

Kemajuan lain yang dicapai melalui program KPEL adalah, jika sebelum program KPEL pemasaran produk (kokon) masih dirasa susah karena satu-satunya pembeli dari Yogyakarta, setelah program KPEL pemasaran produk sudah tidak ada masalah lagi karena atas negosiasi FEDEP dan KSU sekarang ada pengusaha lokal (Wonosobo) yang mau membeli kokon dari petani dengan harga standar. Bahkan produk-produk petani budidaya ulat sutera di sekitar Wonosobo seperti : Temanggung, Purworejo, Banjarnegara dan lain-lain sebagian ada yang dijual ke Wonosobo (pengusaha lokal dimaksud).

Kemajuan lain yang terjadi di Kabupaten Wonosobo : sekarang petani sudah mempunyai mesin pintal benang sutera. Di samping mesin pintal benang sutera, melalui program KPEL ini pemerintah Propinsi Jawa Tengah lewat Dinas Perindustrian membantu Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) untuk membuat tenun kain sutera, dan berkat usaha dan negosiasi KSU dan FEDEP Kabupaten Wonosobo Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Tengah membantu biaya pelatihan dan pemagangan bagi operator mesin pintal benang sutera dan operator ATBM dimaksud.

5.2. Analisis Uji Pangkat Tanda Wilcoxon

Metode uji statistik non-parametrik merupakan alternatif untuk memenuhi kebutuhan kesahihan dan validitas data meskipun hanya berdasar pada asumsi-asumsi umum. Diperlukannya uji statistik non-parametrik mengingat bahwa suatu pengujian populasi seringkali dihadapkan pada suatu uji yang harus dilakukan tanpa ketergantungan asumsi-asumsi yang kaku karena bersifat khusus.

5.2.1. Luas Lahan

Hasil uji hipotesis menggunakan Uji Pangkat Tanda Wilcoxon untuk menghitung kemaknaan statistik Luas Lahan sebelum dan sesudah mengikuti program KPEL ditampilkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1.
Hasil Analisis Luas Lahan
Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Luas Lahan Sebelum	30	1,1667	,76658	,50	3,00
Luas Lahan Sesudah	30	1,6083	1,03533	,50	4,00

Sumber : Diolah dari data primer

Tabel 5.2.
Hasil Uji Hipotesis Luas Lahan

Test Statistics^b

	SESUDAH - SEBELUM
Z	-3,537 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)	,000

a. Based on negative ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test

Ada perbedaan luas lahan petani budidaya ulat sutera sebelum dan sesudah mengikuti program KPEL. Kesimpulan ini berdasarkan perhitungan Uji Pangkat Tanda Wilcoxon, didapatkan nilai signifikan 0,000. Hal ini berarti bahwa probabilitas kurang dari 0,05 yang berarti juga bahwa H_0 ditolak. Bila H_0 ditolak berarti ada perbedaan sangat nyata pada luas lahan antara sebelum dan sesudah mengikuti program KPEL. Peningkatan luas lahan ini dari rata-rata sebesar 1,17 ha pada waktu sebelum mengikuti program KPEL menjadi rata-rata 1,61 ha setelah mengikuti program KPEL.

Penambahan luas lahan ini secara kualitatif juga dipengaruhi oleh pemasaran produk kokon yang dijamin oleh pengusaha lokal melalui program Kemitraan Bagi Pengembangan Ekonomi Lokal. Karena ada kepastian pasar inilah petani berusaha menambah luas lahan untuk kebun murbei sebagai pakan ulat sutera.

5.2.2. Jumlah Produksi

Hasil uji hipotesis menggunakan Uji Pangkat Tanda Wilcoxon untuk menghitung kemaknaan statistik Jumlah Produksi sebelum dan sesudah mengikuti program KPEL ditampilkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.3.
Hasil Analisis Jumlah Produksi
Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Jumlah Produksi Sebelum	30	572,03	291,813	270	1107
Jumlah Produksi Sesudah	30	1213,33	614,752	700	2800

Sumber : Diolah dari data primer

Tabel 5.4.
Hasil Uji Hipotesis Jumlah Produksi

Test Statistics^b

	SESUDAH - SEBELUM
Z	-4,798 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)	,000

a. Based on negative ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test

Ada perbedaan jumlah produksi petani budidaya ulat sutera sebelum dan sesudah mengikuti program KPEL. Kesimpulan ini berdasarkan perhitungan Uji

Pangkat Tanda Wilcoxon, didapatkan nilai signifikan 0,000. Hal ini berarti bahwa probabilitas kurang dari 0,05 yang berarti juga bahwa H_0 ditolak. Bila H_0 ditolak berarti ada perbedaan sangat nyata pada jumlah produksi antara sebelum dan sesudah mengikuti program KPEL. Peningkatan jumlah produksi dari rata-rata sebesar 572,03 kg pada waktu sebelum mengikuti program KPEL menjadi rata-rata 1213,33 kg setelah mengikuti program KPEL.

Peningkatan jumlah produksi petani budidaya ulat sutera ini dipengaruhi oleh ketrampilan yang dimiliki oleh petani setelah mendapatkan pelatihan budidaya ulat sutera yang diselenggarakan program KPEL. Pada waktu sebelum mengikuti program KPEL, jumlah produksi petani budidaya ulat sutera 28 kg kokon per boks menjadi 35 kg kokon per boks.

5.2.3. Jumlah Tenaga Kerja

Hasil uji hipotesis menggunakan Uji Pangkat Tanda Wilcoxon untuk menghitung kemaknaan statistik Jumlah Tenaga Kerja sebelum dan sesudah mengikuti program ditampilkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.5.
Hasil Analisis Jumlah Tenaga Kerja

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Jumlah Tenaga Kerja Sebelum	30	1,80	,610	1	3
Jumlah Tenaga Kerja Sesudah	30	2,70	1,055	2	5

Sumber : Diolah dari data primer

Tabel 5.6.
Hasil Uji Hipotesis Jumlah Tenaga Kerja

Test Statistics ^b	SESUDAH - SEBELUM
Z	-3,834 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)	,000

- a. Based on negative ranks.
- b. Wilcoxon Signed Ranks Test

Ada perbedaan jumlah tenaga kerja petani budidaya ulat sutera sebelum dan sesudah mengikuti program KPEL. Kesimpulan ini berdasarkan perhitungan Uji Pangkat Tanda Wilcoxon, didapatkan nilai signifikan 0,000. Hal ini berarti bahwa probabilitas kurang dari 0,05 yang berarti juga bahwa H_0 ditolak. Bila H_0 ditolak berarti ada perbedaan sangat nyata pada jumlah tenaga kerja antara sebelum dan sesudah mengikuti program KPEL. Peningkatan jumlah tenaga kerja dari rata-rata sebanyak 1,8 orang pada waktu sebelum mengikuti program KPEL menjadi rata-rata 2,7 orang setelah mengikuti program KPEL.

Meningkatnya jumlah tenaga kerja ini sangat dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah budidaya tanaman murbei dan budidaya ulat sutera yang dipelihara petani, meningkatnya jumlah budidaya tanaman murbei dan ulat sutera sangat dipengaruhi oleh harga jual kokon yang dijamin oleh pengusaha lokal.

5.2.4. Pendapatan Rata-Rata

Hasil uji hipotesis menggunakan Uji Pangkat Tanda Wilcoxon untuk menghitung kemaknaan statistik Pendapatan Rata-Rata sebelum dan sesudah mengikuti program ditampilkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.7.
Hasil Analisis Pendapatan Rata-Rata

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Pendapatan Rata-rata Sebelum	30	5576200	3299295,799	2497000	12975000
Pendapatan Rata-rata Sesudah	30	1,2E+07	6147516,086	7000000	28000000

Sumber : Diolah dari data primer

Tabel 5.8.
Hasil Uji Hipotesis Pendapatan Rata-Rata

Test Statistics^b

	SESUDAH - SEBELUM
Z	-4,796 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)	,000

a. Based on negative ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test

Ada perbedaan pendapatan rata-rata petani budidaya ulat sutera sebelum dan sesudah mengikuti program KPEL. Kesimpulan ini berdasarkan perhitungan Uji Pangkat Tanda Wilcoxon, didapatkan nilai signifikan 0,000. Hal ini berarti bahwa probabilitas kurang dari 0,05 yang berarti juga bahwa H_0 ditolak. Bila H_0 ditolak berarti ada perbedaan sangat nyata pada pendapatan rata-rata antara sebelum dan sesudah mengikuti program KPEL. Peningkatan pendapatan rata-rata dari rata-rata sebesar Rp. 5.576.200 pada waktu sebelum mengikuti program KPEL menjadi rata-rata Rp. 12.000.000 setelah mengikuti program KPEL.

Peningkatan pendapatan rata-rata petani budidaya ulat sutera ini dipengaruhi juga oleh harga jual kokon. Jika sebelum mengikuti program KPEL harga kokon laku dijual Rp. 18.000/kg, setelah mengikuti program KPEL kokon

terjual dengan harga Rp. 20.000/kg. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan petani budidaya ulat sutera lebih bersemangat untuk mengembangkan usahanya.

5.2.5. Tabungan Rata-Rata

Hasil uji hipotesis menggunakan Uji Pangkat Tanda Wilcoxon untuk menghitung kemaknaan statistik Tabungan Rata-Rata sebelum dan sesudah mengikuti program ditampilkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.9.
Hasil Analisis Tabungan Rata-Rata

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Tabungan Rata-rata Sebelum	30	491166,67	278563,691	120000	940000
Tabungan Rata-rata Sesudah	30	776866,67	410603,486	200000	1475000

Sumber : Diolah dari data primer

Tabel 5.10.
Hasil Uji Hipotesis Tabungan Rata-Rata

Test Statistics^b

	Tabungan Rata-rata Sesudah - Tabungan Rata-rata Sebelum
Z	-2,026 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)	,043

a. Based on negative ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test

Ada perbedaan tabungan rata-rata petani budidaya ulat sutera sebelum dan sesudah mengikuti program KPEL. Kesimpulan ini berdasarkan perhitungan Uji

Pangkat Tanda Wilcoxon, didapatkan nilai signifikan 0,000. Hal ini berarti bahwa probabilitas kurang dari 0,05 yang berarti juga bahwa H_0 ditolak. Bila H_0 ditolak berarti ada perbedaan sangat nyata pada tabungan rata-rata antara sebelum dan sesudah mengikuti program KPEL. Peningkatan tabungan rata-rata dari rata-rata sebesar Rp. 491.166,67 pada waktu sebelum mengikuti program KPEL menjadi rata-rata Rp. 776.866,67 setelah mengikuti program KPEL.

Peningkatan tabungan rata-rata petani budidaya ulat sutera ini dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan rata-rata. Dengan naiknya pendapatan, maka petani budidaya ulat sutera dapat meningkatkan alokasi dana untuk tabungan. Tabungan disini menurut sebagian responden tidak harus dilakukan di bank atau lembaga keuangan lainnya. Melainkan tabungan anak di sekolah (bagi yang masih memiliki anak sekolah) dihitung juga sebagai tabungan.

5.2.6. Tingkat Kemandirian

Hasil uji hipotesis menggunakan Uji Chi-kuadrat untuk menghitung kemaknaan statistik hubungan Tingkat Kemandirian dengan program KPEL ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 5.11.
Hasil Analisis

Tingkat Kemandirian

	Observed N	Expected N	Residual
Belum Mandiri	8	10,0	-2,0
Dalam Proses Mandiri	6	10,0	-4,0
Mandiri	16	10,0	6,0
Total	30		

Sumber : Diolah dari data primer

Tabel 5.12.
Hasil Uji Chi-Kuadrat Tingkat Kemandirian

Test Statistics

	Tingkat Kemandirian
Chi-Square ^a	5,600
df	2
Asymp. Sig.	,000

a. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 10,0.

Berdasarkan hasil tersebut di atas, frekuensi responden yang sudah mandiri setelah diobservasi memiliki nilai 16 orang, sedangkan menurut H_0 frekuensi yang diharapkan hanya 10. Berdasarkan Uji Chi-kuadrat diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini berarti bahwa probabilitas kurang dari 0,05 yang sama artinya juga dengan menolak H_0 . Bila H_0 ditolak berarti ada hubungan sangat nyata antara tingkat kemandirian sebelum dan sesudah mengikuti program KPEL.

Tingkat kemandirian petani budidaya ulat sutera dipengaruhi beberapa kegiatan yang diselenggarakan program KPEL baik selama program berjalan sampai pasca program. Kegiatan-kegiatan dimaksud antara lain : pelatihan budidaya tanaman murbei, pelatihan budidaya ulat sutera, pelatihan manajemen usaha sampai pada konsultasi pasca program KPEL.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan sesuai tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Program KPEL telah berhasil meningkatkan luas lahan petani budidaya ulat sutera di Kabupaten Wonosobo.
2. Program KPEL telah berhasil meningkatkan jumlah produksi kokon petani budidaya ulat sutera di Kabupaten Wonosobo.
3. Program KPEL telah berhasil meningkatkan jumlah tenaga kerja bagi petani budidaya ulat sutera di Kabupaten Wonosobo.
4. Program KPEL telah berhasil meningkatkan jumlah pendapatan petani budidaya ulat sutera di Kabupaten Wonosobo.
5. Program KPEL telah berhasil meningkatkan jumlah tabungan petai budidaya ulat sutera di Kabupaten Wonosobo.
6. Program KPEL telah berhasil mendirikan sebagian petani di Kabupaten Wonosobo dalam mengelola usaha budidaya ulat sutera.

Saran

1. Keberhasilan Program KPEL sangat tergantung kepada partisipasi stakeholder daerah (terutama pemerintah daerah sebagai fasilitator). Berdasarkan hal tersebut, pemerintah hendaknya selalu mengambil

inisiatif berkaitan dengan pengembangan ekonomi daerah demi kesejahteraan masyarakat di daerah.

2. Dengan program KPEL beberapa kendala yang selama ini menjadi momok bagi petani budidaya ulat sutera perlahan lahan dapat diatas, beberapa kendala dimaksud seperti: Partisipasi pengusaha lokal dalam menjamin pemasaran produk Kokon dari petani budidaya ulat sutera, modal usaha dan lain sebagainya. Atas dasar beberapa manfaat yang dapat dipetik program KPEL di atas, akan lebih tepat manakala pemerintah daerah menerapkan pola kemitraan dalam pengembangan ekonomi daerah/lokal.
3. Program KPEL dengan formulasi Tripartit (Pemerintah, Swasta dan Masyarakat) terlibat dalam proses sampai implementasi program sangat strategis untuk diterapkan dalam rangka pengembangan ekonomi daerah ke depan.
4. Pemerintah daerah sudah saatnya tidak memberikan bantuan berupa modal usaha kepada petani budidaya ulat sutera akan tetapi memberikan pengetahuan tentang cara berbudidaya ulat sutera yang baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad Lincoln, 1997, **Ekonomi Pembangunan**, Edisi Ketiga, Bagian Penerbitan STIE, YKPN, Yogyakarta.
- Bachtiar, Palmira Permata, 1991, **Analisis Ekonomi Komoditas Sutera Alam Di Kabupaten Garut dan Sopeng**, Skripsi, Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Badan Pusat Statistik (BPS)**, 2003, Kabupaten Wonosobo.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, 2000, **Budidaya Murbei dan Sutera Alam**, Padang.
- Bintoro Tjokroamijoyo, dkk. 1980, **Teori Strategi Pembangunan Nasional**, Gunung Agung, Jakarta.
- Bugaran Saragih, 2002, **Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian**, Makalah Disampaikan Pada Acara Simposium, Mahasiswa Pascasarjana, di IPB Bogor.
- Dinas Perkebunan dan Kehutanan, 2002, Bina Usaha, **Data Sutra Alam Kabupaten Wonosobo**,
- Departemen Kehutanan dan Perkebunan, 2000, **Statistik Kehutanan dan Perkebunan Indonesia 1999/2000**, Pusat Data dan Perpetaan Departemen Kehutanan, Jakarta.
- Departemen Kehutanan RI, 2001, **Statistik Pembangunan**, Dirjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS), Jakarta.
- Elis Suyono, 2003, **Potensi dan Pengembangan Budidaya Ulat Sutera di Jawa Tengah**, hlm. 6.
- Elis Suyono, 2002, **Identifikasi Kondisi dan Potensi Budidaya Ulat Sutera di Kabupaten Wonosobo**, Penelitian Mandiri, Wonosobo.
- Elis Suyono, 2003, **Profil Klaster Komoditas Budidaya Ulat Sutera di Kabupaten Wonosobo**, Penelitian Mandiri, Wonosobo.
- Forum For Economic Development and Employment Promotion (FEDEP), 2002, **Data Base UMKM di Kabupaten Wonosobo**, Wonosobo.

- Gujarati Damodar, 1995, **Basic Econometric**, Edisi Ketiga, Mc. Graw-Hill Book Co, Singapura.
- Irfan Nuryatin, 2005, **Analisis Pendapatan Pada Usaha Tani Ulat Sutera (Komparatif Antara Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Pati)**, Wonosobo.
- Jakaria, 2000, **Analisis Interaktif Genotip Lingkungan Pada Beberapa Sifat Kuantitatif Ulut Sutera (Bombyx Mori L)**, Bogor.
- Jamalia, 2000, **Penggunaan Kalsium Propionat dan Kalsium Sorbat Sebagai Bahan Pengawet Pada Pakan Buatan Ulut Sutera**, Bogor.
- Joe Holand Peter Henriot, SJ. 1990, **Analisis Sosial dan Refleksi Theologis Kaitan Iman dan Keadilan**, Kanisius, Yogyakarta.
- Keputusan Dirjen RRL No. 051/Kpts/V/1998, tentang **Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Proyek Padat Karya Bidang Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Tahun 1998/1999**, Jakarta.
- Masri Singarimbun, 1989, **Metode Penelitian Survei**, LP3ES, Jakarta.
- Ni Made Shanti Parmini, 2003, **Pengaruh Kredit Usaha Tani Dari Koperasi Serba Usaha (KSU) Utama Terhadap Pendapatan Petani Sayur di Tabanan**, Bali.
- Peter Reger, 2003, **Ulut Sutera dan Produksi Kokon**, Regeonal Economic Development Program, GTZ Jerman, Jakarta.
- Piet Budiono, 2005, **Pendampingan Perempuan Pedang Tradisional Melalui Kredit Mikro (Tesis)**, Semarang.
- Prawerti, Diah, 1995, **Analisis Kegiatan Agroindustri Sutera Alam: Studi Kasus Pada PT. Indo Jado Sutera Pratama Sukabumi**, Jawa Barat, IPB, Bogor.
- Sekretariat Program KPEL, 2002, **Panduan Umum Program Kemitraan Bagi Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL)**, Jakarta.
- Sekretariat Program KPEL, 2003, **Panduan Implementasi Program Kemitraan Bagi Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL)**, Jakarta.
- Sekretariat Program KPEL, 2003, **Buku Pegangan Bagi Kader Kemitraan Bagi Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL)**, Jakarta.

- Sihite, Tiur Taruli, 1991, **Analisis Investasi Pengusahaan Kokon Sebagai Bahan Baku Pembuatan Benang Sutra**, IPB, Bogor.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi, 1995, **Metode Penelitian Survei**, LP3ES, Jakarta.
- Singih Santoso dan Fandy Tjiptono, 2001, **Riset Pemasaran: Konsep dan Aplikasi dengan SPSS**, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Soekartawi, dkk, 1986, **Ilmu Usaha dan Penelitian Untuk Pengembangan Petani Kecil** UI Press, Jakarta.
- Soekirman, dkk. 2000, **Sutra Alam Indonesia**, Yayasan Sarana Wana Jaya, Jakarta.
- Surat Keputusan Dirjen RRL No. 042/Kpts/V/1998, tentang **Kebijaksanaan dan Standar Teknis Proyek Padat Karya Bidang Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Tahun 1998/1999**, Jakarta.
- Sri Utami Kuntjoro, 2000, **Sutra Alam Indonesia**, Jakarta.

LAMPIRAN -LAMPIRAN

Frequency Tabela

Luas Lahan Sebelum

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	,50	9	30,0	30,0	30,0
	,75	5	16,7	16,7	46,7
	1,00	6	20,0	20,0	66,7
	1,25	1	3,3	3,3	70,0
	1,50	3	10,0	10,0	80,0
	2,00	2	6,7	6,7	86,7
	2,50	2	6,7	6,7	93,3
	3,00	2	6,7	6,7	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

Luas Lahan Sesudah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	,50	4	13,3	13,3	13,3
	,75	6	20,0	20,0	33,3
	1,00	3	10,0	10,0	43,3
	1,25	2	6,7	6,7	50,0
	1,50	4	13,3	13,3	63,3
	1,75	3	10,0	10,0	73,3
	2,50	2	6,7	6,7	80,0
	3,00	3	10,0	10,0	90,0
	3,50	2	6,7	6,7	96,7
	4,00	1	3,3	3,3	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

Jumlah Produksi Sebelum

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	270	9	30,0	30,0	30,0
	540	14	46,7	46,7	76,7
	610	1	3,3	3,3	80,0
	1080	3	10,0	10,0	90,0
	1107	3	10,0	10,0	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

Jumlah Produksi Sesudah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	700	10	33,3	33,3	33,3
	1050	12	40,0	40,0	73,3
	1400	2	6,7	6,7	80,0
	2100	3	10,0	10,0	90,0
	2450	2	6,7	6,7	96,7
	2800	1	3,3	3,3	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

Jumlah Tenaga Kerja Sebelum

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	9	30,0	30,0	30,0
	2	18	60,0	60,0	90,0
	3	3	10,0	10,0	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

Jumlah Tenaga Kerja Sesudah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	19	63,3	63,3	63,3
	3	4	13,3	13,3	76,7
	4	4	13,3	13,3	90,0
	5	3	10,0	10,0	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

Pendapatan Rata-rata Sebelum

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2497000	9	30,0	30,0	30,0
	3746000	1	3,3	3,3	33,3
	4995000	13	43,3	43,3	76,7
	7492000	1	3,3	3,3	80,0
	9990000	3	10,0	10,0	90,0
	12847500	2	6,7	6,7	96,7
	12975000	1	3,3	3,3	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

Pendapatan Rata-rata Sesudah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	7000000	10	33,3	33,3	33,3
	10500000	12	40,0	40,0	73,3
	14000000	2	6,7	6,7	80,0
	21000000	3	10,0	10,0	90,0
	24500000	2	6,7	6,7	96,7
	28000000	1	3,3	3,3	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

Tabungan Rata-rata Sebelum

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<250000	6	20,0	20,0	20,0
	250000s/d500000	10	33,3	33,3	53,3
	500000s/d750000	6	20,0	20,0	73,3
	750000s/d1000000	8	26,7	26,7	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

Tabungan Rata-rata Sesudah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<250000	3	10,0	10,0	10,0
	1000000>	8	26,7	26,7	36,7
	250000s/d500000	8	26,7	26,7	63,3
	500000s/d750000	5	16,7	16,7	80,0
	750000s/d1000000	6	20,0	20,0	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

Tingkat Kemandirian

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Belum Mandiri	8	26,7	26,7	26,7
	Dalam Proses Mandiri	6	20,0	20,0	46,7
	Mandiri	16	53,3	53,3	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

Deskripsi Masing-masing Variabel

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Luas Lahan Sebelum	30	1,1667	,76658	,50	3,00
Jumlah Produksi Sebelum	30	572,03	291,813	270	1107
Jumlah Tenaga Kerja Sebelum	30	1,80	,610	1	3
Pendapatan Rata-rata Sebelum	30	5576200	3299295,799	2497000	12975000
Tabungan Rata-rata Sebelum	30	491166,67	278563,691	120000	940000
Luas Lahan Sesudah	30	1,6083	1,03533	,50	4,00
Jumlah Produksi Sesudah	30	1213,33	614,752	700	2800
Jumlah Tenaga Kerja Sesudah	30	2,70	1,055	2	5
Pendapatan Rata-rata Sesudah	30	1,2E+07	6147516,086	7000000	28000000
Tabungan Rata-rata Sesudah	30	776866,67	410603,486	200000	1475000

Ranks

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Luas Lahan Sesudah - Luas Lahan Sebelum	Negative Ranks	0 ^a	,00	,00
	Positive Ranks	16 ^b	8,50	136,00
	Ties	14 ^c		
	Total	30		
Jumlah Produksi Sesudah - Jumlah Produksi Sebelum	Negative Ranks	0 ^d	,00	,00
	Positive Ranks	30 ^e	15,50	465,00
	Ties	0 ^f		
	Total	30		
Jumlah Tenaga Kerja Sesudah - Jumlah Tenaga Kerja Sebelum	Negative Ranks	0 ^g	,00	,00
	Positive Ranks	18 ^h	9,50	171,00
	Ties	12 ⁱ		
	Total	30		
Pendapatan Rata-rata Sesudah - Pendapatan Rata-rata Sebelum	Negative Ranks	0 ^j	,00	,00
	Positive Ranks	30 ^k	15,50	465,00
	Ties	0 ^l		
	Total	30		
Tabungan Rata-rata Sesudah - Tabungan Rata-rata Sebelum	Negative Ranks	11 ^m	12,18	134,00
	Positive Ranks	19 ⁿ	17,42	331,00
	Ties	0 ^o		
	Total	30		

- a. Luas Lahan Sesudah < Luas Lahan Sebelum
- b. Luas Lahan Sesudah > Luas Lahan Sebelum
- c. Luas Lahan Sebelum = Luas Lahan Sesudah
- d. Jumlah Produksi Sesudah < Jumlah Produksi Sebelum
- e. Jumlah Produksi Sesudah > Jumlah Produksi Sebelum
- f. Jumlah Produksi Sebelum = Jumlah Produksi Sesudah
- g. Jumlah Tenaga Kerja Sesudah < Jumlah Tenaga Kerja Sebelum
- h. Jumlah Tenaga Kerja Sesudah > Jumlah Tenaga Kerja Sebelum
- i. Jumlah Tenaga Kerja Sebelum = Jumlah Tenaga Kerja Sesudah
- j. Pendapatan Rata-rata Sesudah < Pendapatan Rata-rata Sebelum
- k. Pendapatan Rata-rata Sesudah > Pendapatan Rata-rata Sebelum
- l. Pendapatan Rata-rata Sebelum = Pendapatan Rata-rata Sesudah
- m. Tabungan Rata-rata Sesudah < Tabungan Rata-rata Sebelum
- n. Tabungan Rata-rata Sesudah > Tabungan Rata-rata Sebelum
- o. Tabungan Rata-rata Sebelum = Tabungan Rata-rata Sesudah

Hasil Uji Pangkat Tanda Wilcoxon

Test Statistics^b

	Luas Lahan Sesudah - Luas Lahan Sebelum	Jumlah Produksi Sesudah - Jumlah Produksi Sebelum	Jumlah Tenaga Kerja Sesudah - Jumlah Tenaga Kerja Sebelum	Pendapatan Rata-rata Sesudah - Pendapatan Rata-rata Sebelum	Tabungan Rata-rata Sesudah - Tabungan Rata-rata Sebelum
Z	-3,537 ^a	-4,798 ^a	-3,834 ^a	-4,796 ^a	-2,026 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,043

a. Based on negative ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test

Hasil Uji Chi-kuadrat

Tingkat Kemandirian

	Observed N	Expected N	Residual
1	8	10,0	-2,0
2	6	10,0	-4,0
3	16	10,0	6,0
Total	30		

Test Statistics

	Tingkat Kemandirian
Chi-Square ^a	5,600
df	2
Asymp. Sig.	,000

a. 0 cells (,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 10,0.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini saya :

N a m a : Elis Suyono
Tempat, Tanggal lahir : Pati, 16 November 1966
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Jl. Raya Kalibeber Km. 2 Ketingring Rt.
01 Rw. 07 Kecamatan Wonosobo Kabupaten
Wonosobo 56319 Telp. 0286 – 322019 HP.
081 2295 9362

A. PENDIDIKAN FORMAL

1. Madrasah Ibtida'iyah Matholi'ul Falah di Pati Lulus Tahun 1980
2. Madrasah Tsanawiyah Matholi'ul Falah di Pati Lulus Tahun 1983
3. Madrasah Aliyah Mu'alimin Adiwijaya di Pati Lulus Tahun 1986
4. IAIN Walisongo Semarang, Mengambil Fakultas Ushuluddin Jurusan Aqidah dan Filsafat, Lulus Tahun 1991
5. Pasca Saarlana Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang Mengambil Progran Studi Magister Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan (MIESP) Konsentrasi Pembangunan Ekonomi Daerah (PED) Lulus tahun 2006

B. PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Pesantren Taman Pendidikan Islam Indonesia (TPII) Kajen margoyoso Pati Tahun 1983 – 1986 (Ada Syahadah)
2. Kursus Managemen Pemasaran Koperasi, diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Maslahul Huda, Kajen, margoyoso, Pati, Tahun 1985 (Ada Piagam)

3. Latihan Kepemimpinan Mahasiswa Tingkat Dasar, diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang Tahun 1987 (Ada Piagam)
4. Latihan Kepemimpinan Mahasiswa Tingkat Menengah, diselenggarakan oleh BPKM IAIN Walisongo Semarang, Tahun 1988 (Ada Piagam)
5. Latihan Kepemimpinan Mahasiswa Tingkat Nasional yang diselenggarakan Pengurus Besar PMII Pusat di Wisma Ciliwung Jakarta tahun 1988 (ada Piagam)
6. Latihan Kepemimpinan Pemuda tingkat Nasional dan Penataran P4 Pola 144 Jam di selenggarakan oleh Menpora di PPSPD Cibubur Jawa barat Tahun 1991 (Ada Piagam)
7. Pendidikan dan pelatihan Penelitian Tingkat Dasar, diselenggarakan oleh STAIN Purwokerto Jawa Tengah, Tahun 1996 (Ada Piagam)
8. Pendidikan dan Pelatihan Penelitian Tingkat Menengah pola 600 Jam diselenggarakan oleh Pusat Penelitian IAIN Walisongo, Semarang, Tahun 1997 (Ada Piagam)
9. Workshop Tentang Pendekatan terpadu Pengembangan Ekonomi Daerah dan Perluasan Lapangan Kerja, yang diselenggarakan GTZ Jerman kerjasama dengan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, di Hotel Patra Jasa Semarang Tahun 1999 (ada Piagam)
10. Workshop Tentang Perencanaan partisipatif Bagi Pengembangan Ekonomi Daerah dan Perluasan Lapangan Kerja yang diselenggarakan GTZ Jerman kerjasama dengan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, di Hotel Patra Jasa Semarang Tahun 1999 (ada Piagam)
11. Workshop Tentang Feasibility Study dan Bussines Plan, yang diselenggarakan GTZ Jerman kerjasama dengan Pemerintah

Propinsi Jawa Tengah, di Hotel Graha santika, Semarang Tahun 2000 (ada Piagam)

12. Workshop Tentang Menggali Potensi dan Sumber Daya daerah, sebuah antisipasi Pelaksanaan otonomi daerah, yang diselenggarakan GTZ Jerman kerjasama dengan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, di Hotel Patra Jasa Semarang Tahun 2000 (ada Piagam)
13. Workshop Tentang Cara membuat /Menyusun Proposal yang Feasible bagi Perusahaan, yang diselenggarakan GTZ Jerman kerjasama dengan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, di Hotel Patra Jasa Semarang Tahun 2001 (ada Piagam)
14. Workshop Tentang Gender meanstreaming, yang diselenggarakan kerjasama FEDEP Kabupaten Wonosobo dengan GTZ Jerman di Hotel Krisna Wonosobo tahun 2001 (Ada Piagam)
15. Training Of Trainer (TOT) Program Kemitraan bagi Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL) yang diselenggarakan oleh BAPPENAS dan CIDES PERSADA COUNSULTAN di Bogor Jawa barat Tahun 2001 (Ada Piagam)
16. Pelatihan Metodologi Pengabdian pada Masyarakat, yang diselenggarakan Oleh KOPERTIS VI Semarang, di bandungan Ambarawa, Tahun 2002 (Ada Piagam)
17. Konsinyasi Program Kemitraan Bagi Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL) yang diselenggarakan oleh BAPPENAS dan CIDES PERSADA COUNSULTAN di Bogor Jawa barat Tahun 2002 (Ada Piagam)
18. Pelatihan metodologi Pengajaran, yang diselenggarakan oleh KOPERTAIS X Jawa Tengah, di Gedung PKK Ungaran Semarang Tahun 2002 (Ada Piagam)
19. Workshop Forum Ekspor di Pekan raya Jakarta, Tahun 2002 (Ada Piagam)

20. Pelatihan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Kemitraan bagi Pengembangan Ekonomi Lokal (SIM - KPEL) yang diselenggarakan BAPPENAS di Universitas Indonesia, Jakarta Tahun 2002 (Ada Piagam)
21. Pelatihan Internet dan Desain Web, yang diselenggarakan oleh GTZ Jerman di Hotel Dinya Puri Semarang tahun 2002 (Ada Piagam)
22. Pelatihan Teknik Pendampingan Usaha Mikro kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Propinsi Jawa Tengah, di Bandungan Ambarawa Tahun 2003 (Ada Piagam)
23. Pelatihan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang diselenggarakan Bank Indonesia dan Satgas KKMB Propinsi Jawa Tengah dan Cemsed UKSW Salatiga di bandungan Ambarawa Tahun 2004 (Ada Piagam)
24. Workshop Donor dan Investasi Nasional di BAPPENAS diselenggarakan oleh BAPPENAS Jakarta, tahun 2004

C. PENGELAMAN ORGANISASI

1. Wakil Sekretaris Senat Mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang Periode Tahun 1987 – 1989
2. Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang, Periode Tahun 1989 – 1991
3. Ketua Rayon Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang, Periode Tahun 1988/1989
4. Pengurus Himpunan Mahasiswa Pati Semarang (HIMPAS) Tahun 1988/1989
5. Pengurus DPD II KNPI kabup[at]aten Wonosobo Periode Tahun 1995/1998

6. Pengurus DPD II KNPI kabup[at]aten Wonosobo Periode Tahun 1999/2003
7. Anggota Panitia Pemilihan daerah (PPD II) Kabupaten Wonosobo Tahun 1999
8. Ketua Tim Verifikasi PPD II Kabupaten Wonosobo Tahun 1999
9. Wakil Ketua Forum Pengembangan Ekonomi daerah dan perluasan Lapangan Kerja (Forum For Economic Development and Employment Promotion-FEDEP Kabupaten Wonosobo sampai dengan tahun 2006 (SK Bupati)
10. Anggota Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Jawa Tengah Tahun 2000/2003 (SK Gubernur Jawa Tengah)
11. Anggota Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Jawa Tengah Tahun 2003/2007 (SK Gubernur Jawa Tengah)
12. Sekretaris Konsorsium FEDEP Jawa Tengah sampai dengan tahun 2005
13. Devisi Pengembangan UMKM Kadin Kabupaten Wonosobo, Tahun 2002 – 2007
14. Kabupaten Suport Unit (KSU) Program kemitraan Bagi Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL) BAPPENAS untuk kabupaten Wonosobo Tahun 2002 (Ada Surat Kontrak)
15. Kader Penggerak Ekonomi (KPE) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 – 2004 (SK Kepala Bappda Propinsi Jawa Tengah)
16. Suport Unit (KSU) Program kemitraan Bagi Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL) BAPPENAS untuk kabupaten Wonosobo Tahun 2003 (Ada Surat Kontrak)
17. Suport Unit (KSU) Program kemitraan Bagi Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL) BAPPENAS untuk kabupaten Wonosobo Tahun 2004 (Ada Surat Kontrak)
18. Suport Unit (KSU) Program kemitraan Bagi Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL) BAPPENAS untuk kabupaten Wonosobo Tahun 2005 (Ada Surat Kontrak)

19. Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) Bagi Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) Kabupaten Wonosobo Sejak tahun 2004
20. Sekretaris Konsorsium Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) Jawa tengah Periode 2005 – 2009
21. Sekretaris Asosiasi Konsultan Keuangan Mitra bank bagi Usaha Mikro kecil dan Menengah (Asosiasi-KKMB) Propinsi Jawa Tengah Periode 2006 - 2009

D. KEGIATAN PENDAMPINGAN YANG PERNAH DILAKUKAN

1. Mendampingi UKM Kopi di Desa Mojo sari Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo mulai tahun 2000 sampai Sekarang
2. Mendampingi UKM Opak Singkong di Desa Kalibeber Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo mulai tahun 2001 sampai Sekarang
3. Mendampingi UKM Tahu di Desa Selomerto Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo mulai tahun 2001 sampai Sekarang
4. Mendampingi UKM Pande besi di Pagerkukuh Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo mulai tahun 2001 sampai Sekarang
5. Mendampingi UKM Bulu Domba Desa Klowoh Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo mulai tahun 2001 sampai Sekarang
6. Mendampingi UKM Tembaga Di Desa Suren Gede Kecamatan Kretek Kabupaten Wonosobo mulai tahun 2001 sampai Sekarang
7. Mendampingi 40 Petani Ulat di kabupaten Wonosobo tahun 2001 sampai sekarang
8. Mendampingi petani ulat sutera program KPEL BAPPENAS untu Kabupaten Wonosobo tahun 2002 sampai tahun 2005

9. Mendampingi petani ulat sutera program KPEL BAPPENAS untu Kabupaten Wonosobo tahun 2003 sampai tahun 2005
10. Mendampingi petani ulat sutera program KPEL BAPPENAS untu Kabupaten Wonosobo tahun 2004 sampai tahun 2005
11. Mendampingi petani ulat sutera program KPEL BAPPENAS untu Kabupaten Wonosobo tahun 2005
12. Membimbing Mahasiswa Dalam pendampingan Opak Singkong di desa kalibeber Kecamatan Mojotengah kabupaten Wonosobo tahun 2003

E. PENELITIAN YANG PERNAH DILAKSANAKAN

1. Eksistensi Tuhan Dalam pandangan Ibnu Rusyd dan Thomas Aquinas (Studi Komparatif) Penelitian Individual Tahun 1991
2. Studi Analisis Tentang Nilai Nilai Keislaman dalam falsafah pancasila (Penelitian Individual) Tahun 1997
3. Kondisi Taman Pendidikan Al Qur'an di kabupaten Wonosobo Tahun 1996
4. Bentuk kalimat Perintah dalam Surat Al Baqarah (Penelitian kelompo) Tahun 1996
5. Bentuk Amstal Dalam Surat al Baqarah (Penelitian Kelompok) Tahun 1998
6. Identifikasi Kondisi dan Potensi Usaha kecil dan Menengah Se-Kabupaten Wonosobo (Penelitian Kelompok) Tahun 2001
7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Usaha tani Kentang di Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo (Penelitian Individual) Tahun 2002
8. Baseline Study Klaster Komoditas Ulat Sutera di Kabupaten Wonosobo (Penelitian Individual) Tahun 2002
9. Identifikasi Kondisi dan Potensi Budidaya Ulat Sutera di Kabupaten Wonosobo (Penelitian Dalam rangka Penyusunan

Buku Profil Budidaya Ulat Sutera di Kabupaten Wonosobo (Penelitian Individual) tahun 2003

10. Analisis Kelayakan Finansial Usaha Tani Budidaya Ulat Sutera di kabupaten Wonosobo (Penelitian Individual) Tahun 2003
11. Studi Komparatif Pengembangan Budidaya Ulat Sutera Antara Propinsi Jawa Tengah Indonesia dan Sanghai Cina (Penelitian Dalam rangka Kunjungan Kerja dan Magang bersama Tim Propinsi Jawa Tengah ke Sanghai Cina) Tahun 2004
12. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Produksi Usaha Tani Budidaya Ulat Sutera di Kabupaten Wonosobo (Penelitian Individual) Tahun 2005
13. Pengaruh Program Kemitraan bagi Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL) Terhadap Pendapatan Petani Budidaya Ulat Sutera Di Kabupaten Wonosobo Tahun 2006

F. MENJADI NARA SUMBER/PEMAKALAH HANYA TAHUN 2002 SAMPAI SEKARANG

1. Menjadi Pemakalah pada Seminar Regional Tentang Evaluasi Pelaksanaan FEDEP diselenggarakan oleh FPESD di BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah, Tahun 2002
2. Menjadi Pemakalah pada Workshop Regional Program KPEL di selenggarakan oleh BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah, Tahun 2002
3. Menjadi Pemakalah pada Seminar Regional tentang Strategi Pengembangan FEDEP diselenggarakan oleh FPESD, di BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah, Tahun 2002
4. Menjadi Nara Sumber Kunjungan Kerja Program KPEL Propinsi Jawa Tengah di Manado (Sulawesi Utara) tahun 2003
5. Menjadi Nara Sumber Studi banding Petani Budidaya Ulat Sutera Kabupaten Wonosobo di Tasikmalaya Jawa barat, Tahun 2003

6. Menjadi Pemakalah pada Seminar Regional Tentang Strategi Pengembangan Budidaya Ulat Sutera di Jawa Tengah diselenggarakan Kerjasama UNSIQ – FEDEP – Bapeda kabupaten Wonosobo dan GTZ Jerman di UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo, Tahun 2003
7. Menjadi Pemakalah Pada Evaluasi Program KPEL Tingkat Nasional di Hotel Bumikarsa Komplek Bidakara Jakarta, diselenggarakan oleh Sekretariat KPEL BAPPENAS Jakarta, Tahun 2003
8. Menjadi Pemakalah pada Bisnis dan Gelar Potensi Komuditas , Kabupaten/Kota Tingkat Nasional di Hotel Indonesia, Jakarta, diselenggarakan oleh Sekretariat KPEL BAPPENAS Jakarta, Tahun 2003
9. Menjadi Pemakalah pada Evaluasi Program KPEL, di Hotel Bumi Karsa Komplek Bidakara, Jakarta, diselenggarakan oleh Sekretariat KPEL BAPPENAS Jakarta, Tahun 2004
10. Mernjadi Pemakalah pada Pelatihan Kepemimpinan bagi OSIS SMU Se-Kabupaten Wonosobo, yang diselelenggarakan oleh Kantor Kesbanglimas Kabupaten Wonosobo di Hotel Dewi Wonosobo, Tahun 2004
11. Menjadi Pemakalah pada acara Rakor Ekonomi Industri dan Perdagangan (IKUINDA) Kabupaten Wonosobo, yang diselenggarakan oleh Bagian Ekonomi Pemda kabupaten Wonosobo, Tahun 2004
12. Menjadi Nara Sumber pada Workshop dan Temu Usaha dengan Thema ; Membangun Jaringan Permodalan Bagi UMKM di Kabupaten Wonosobo, diselenggarakan oleh FEDEP di Rumah makan Wonobuga Wonosobo, Tahun 2005
13. Menjadi Nara Pemakalah pada pelatihan Penelitian bagi Dosen PTAIS Se - Jawa Tengah, yang diselenggarakan oleh

KOPERTAIS Kerjasama dengan UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo, di Hotel Dewi Wonosobo, Tahun 2005

14. Menjadi Pemakalah pada Evaluasi Program KPEL Tingkat Jawa Tengah yang diselenggarakan BAPPENAS di BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah, Tahun 2005
15. Menjadi Pemakalah pada Acara Temu Bisnis dan Investasi Program KPEL Yang Diselenggarakan oleh BAPPENAS di BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah, Tahun 2005
16. Menjadi Nara Sumber Pada Acara Forum Komunikasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) dengan Perbankan di Gedung Bank Indonesia Semarang, Tahun 2005
17. Menjadi nara Sumber pada Evaluasi Akhir Program KPEL BAPPENAS, untuk Propinsi Jawa Tengah di Hotel Bumi Karsa Komplek Bidakara yang Diselenggarakan Sekretariat KPEL BAPPENAS, Jakarta, tahun 2005

G. BUKU YANG TELAH DITERBITKAN

1. Biografi dan Pemikiran KH. Muntaha Al Khafidz
2. Kewirausahaan
3. Metodologi Penelitian (Masih dalam proses Penyelesaian)

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa

Wonosobo 16 Februari 2006

ELIS SUYONO

